

PRODUK
DOMESTIK
REGIONAL
BRUTO

LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN ANALISA PDRB KECAMATAN
SEKABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 – 2023



LAPORAN PENELITIAN
KAJIAN ANALISA PDRB KECAMATAN
SEKABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 – 2023

KERJASAMA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT**

BANJARMASIN

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya adalah pembangunan ekonomi. Proses ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk atau masyarakat dalam jangka panjang dan menghasilkan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi semua warga negara disebut pembangunan ekonomi. Pembangunan teknologi, perspektif masyarakat, dan institusi akan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan ekonomi adalah perpaduan atau kombinasi kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk (pendapatan perkapita). Pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa tahapan proses pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui banyak indikator ekonomi dan sosial, yang pada dasarnya menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah menjalankan proses pembangunan.

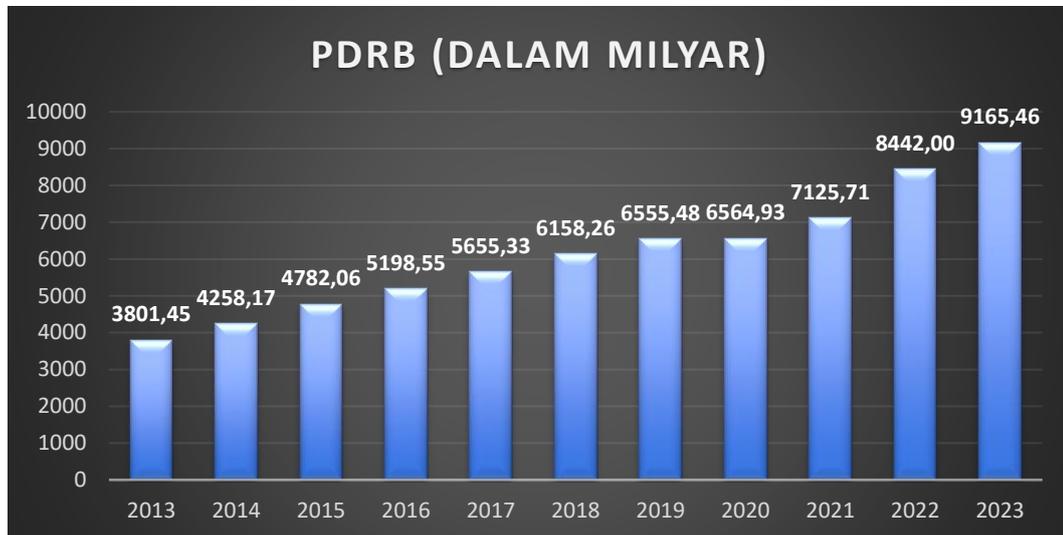
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dari aspek waktu yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode tahunan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan yang memadai, dengan target capaian disesuaikan dengan kondisi daerah dan informasi yang ada mengenai program-program di masa yang akan datang yang mungkin akan berpengaruh pada besaran target indikator makro ekonomi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator kinerja makro yang umumnya digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi serta untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah selama periode waktu tertentu. Disamping itu, PDRB juga dapat dipakai sebagai bahan evaluasi kegiatan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. PDRB adalah jumlah total nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di seluruh wilayah tertentu selama satu tahun. Sektor produksi ini terdiri dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha. Jumlah PDRB dapat dihitung baik dengan harga berlaku (harga saat ini) maupun harga konstan (harga konstan). Ada tiga pendekatan yang sering digunakan dalam menghitung PDRB sebuah wilayah yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan produksi.

Kinerja pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diukur dengan menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk memperlihatkan pertumbuhannya. PDRB Harga Konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan barang dan jasa yang diproduksi setiap tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan, dimana masih adanya unsur inflasi didalam dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Selain itu, PDRB per kapita merupakan indikator kinerja tambahan yang terkait dengan besaran PDRB regional bruto. PDRB per kapita diperoleh dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Angka pendapatan per kapita menunjukkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap orang dan dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tingkat pertumbuhan ekonomi, di sisi lain, diukur sebagai prosentase kenaikan atau penurunan PDRB Harga konstan setiap tahun dibandingkan angka tahun sebelumnya.

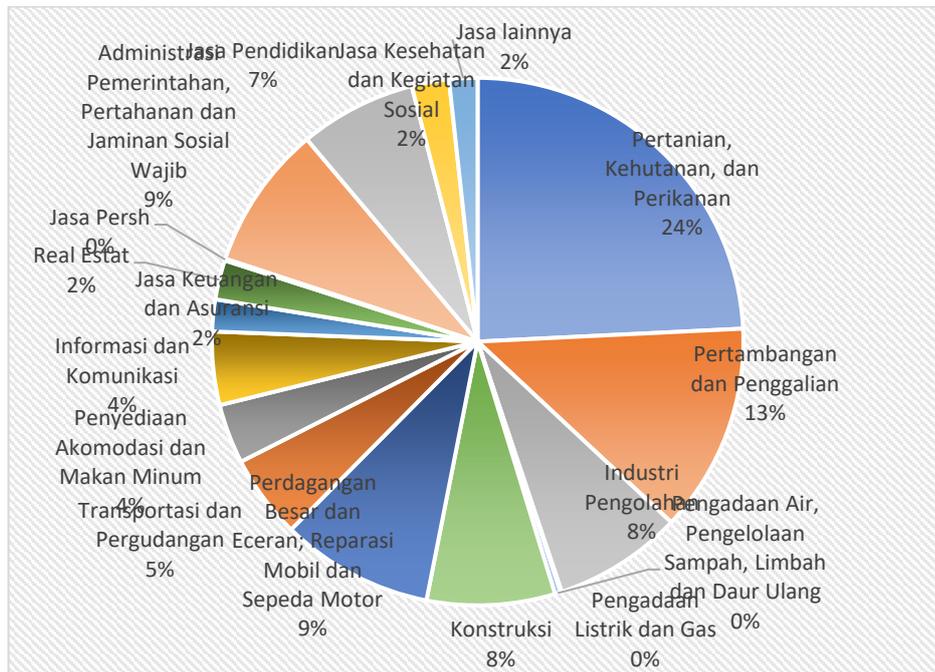
Selama periode 2013 sampai dengan 2023 PDRB kabupaten Hulu Sungai Selatan Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi Pandemi Covid yang berdampak pada melambatnya aktivitas perekonomian disemua wilayah. Namun pada tahun 2021 sampai dengan 2023

PDRB kembali mengalami peningkatan yang berarti bahwa kabupaten HSS mulai kembali meningkatkan aktivitas ekonominya.



Gambar 1.1
PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan Atas Dasar Harga Berlaku
Periode tahun 2013 – 2022

Secara sektoral, berdasarkan data PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurun waktu 2013-2023, kontribusi sektor/lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (24,22%) dan sektor/lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (12,79%) merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disusul oleh sektor/lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar (9,29 %) dan sektor/lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar (8,80 %).



Gambar 1.2
Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku periode tahun 2013 – 2023

Jika dilihat pada gambar 3. Diketahui bahwa terjadi perubahan struktur perekonomian di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada tahun 2023 sektor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 20,53 persen melebihi kontribusi dari sektor pertanian yang menurun menjadi 20,48 persen. Selain itu sektor yang juga mengalami peningkatan kontribusi adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 9,51 persen.

turun menjadi 5,28 persen dan pada saat Pandemi Covid 19 terjadi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan -1,19 persen. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 4,19 persen dan meningkat lagi menjadi 5,27 persen pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2013 sampai dengan 2023 rata rata PDRB HSS berada diatas PBRB Provinsi Kecuali pada tahun 2022 dan 2023.

PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbentuk dari PDRB 11 (Sebelas) Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Oleh karena itu pengukuran atau penghitungan PDRB setiap Kecamatan sangat penting dilakukan setiap tahun agar dapat diperoleh PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan agar dapat diketahui pertumbuhan perekonomian dalam suatu wilayah. PDRB pada satu Kecamatan pada umumnya berbeda dengan PDRB pada Kecamatan lainnya. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap Kecamatan menjadi suatu proses produksi hingga menghasilkan produk pada Kecamatan tersebut. Sumber daya yang dikelola oleh suatu Kecamatan dapat berupa antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia (tenaga kerja), sumber daya modal (kapital), sumber daya sarana infrastruktur. PDRB Kecamatan dapat berubah setiap tahunnya yang dapat dipengaruhi oleh factor internal (sumber daya) dan factor eksternal yang berasal dari luar Kecamatan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi tinggi dan kesempatan menjadi kabupaten yang maju secara ekonomi harus disikapi dengan cara pandang yang komprehensif. Satu hal yang perlu disadari bahwa konsekuensi pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini yang mendasari bahwa analisis PDRB kecamatan se kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan untuk dapat memantau perkembangan ekonomi secara sektoral. Pencermatan perkembangan beberapa indikator sosial juga tersaji pada analisis ini, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi penentuan kebijakan pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang lebih maju dan tepat sasaran.

1.2. Dasar Pelaksanaan

Adapun dasar dari pelaksanaan kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari pekerjaan Penyusunan Kajian Analisis PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 - 2023 adalah memperoleh data dan analisis yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan pekerjaan Penyusunan Kajian Analisis PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 - 2023 Tahun Anggaran 2024 adalah:

- a. Mengetahui struktur dan dinamika ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 - 2023;
- b. Menyediakan hasil analisis sektoral PDRB Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan antar wilayah kecamatan tahun tahun 2013 - 2023 menurut kategori lapangan usaha;
- c. Menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan kualitas perencanaan dan validitas implementasi program pembangunan.

1.4. Manfaat

Manfaat hasil Penyusunan Analisis PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 - 2023 adalah dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam menentukan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke depan.

1.5. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengumpulan data, penghitungan, dan analisis adalah di 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.6. Sumber Pendanaan

Pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Analisis PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 - 2023 seluruhnya dibebankan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024

1.7. Tim Peneliti

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini, dilaksanakan oleh Tim peneliti yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang memadai, dengan kualifikasi pendidikan, Magister/Master (S2) dan Doktor (S3) yang sesuai dengan bidang keahlian dari lembaga Penelitian yang kompeten dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua Tim Peneliti : Dr. Meina Wulansari Yusniar, SE.,M.Si
Anggota : Dr. Monica Rahardian Ary , SE, M,Si
Prof. Sunardi, M.Sc.,Ph.D
Doni Stiadi, S.Si.,M.Si

1.8. Rencana Kerja

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan Kajian Analisis PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Pemrosesan berkas-berkas Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);
- b) Penyusunan Metodologi Analisis;
- c) Pengumpulan data sekunder;
- d) Tabulasi dan pengolahan data;

- e) Analisis dan penyajian;
- f) Penyerahan Draft hasil kajian.

1.9. Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan Penyusunan Kajian Analisis PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Menyediakan angka PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan di Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut lapangan usaha;
- b) Menganalisis laju pertumbuhan ekonomi daerah menurut lapangan usaha tahun 2013 – 2023;
- c) Menganalisis gambaran dan dinamika struktur perekonomian daerah serta besarnya peranan masing-masing kategori dan subkategori (kelompok) lapangan usaha tahun 2013 – 2023;
- d) Menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 – 2023;

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pembangunan Ekonomi

Sebelum tahun 1970, pembangunan diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dalam pengertian tersebut pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi sehingga pembangunan yang dilaksanakan hanya mengedepankan pembangunan bidang ekonomi dan mengesampingkan pembangunan bidang lainnya. Hasilnya memang terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak disertai dengan perbaikan taraf hidup sebagian besar masyarakat, justru tingkat kemiskinan absolut semakin tinggi, ketimpangan pendapatan semakin mencolok, jumlah pengangguran semakin besar, dan utang luar negeri yang semakin membengkak.

Saat ini definisi mengenai pembangunan sudah jauh lebih berkembang. Penekanannya tidak hanya pada bidang ekonomi. Salah satunya seperti dikemukakan Todaro dan Smith (2006) bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Menurut Arsyad (1996) Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Menurut Schumpeter dalam (Jhingan 2000) pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*discontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Sukirno (2012) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat

dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.

Berdasarkan definisi diatas diketahui bahwa terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, yaitu :

- a) Pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa.
- b) Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Perkapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
- c) Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus.

2.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah.

Dalam arti ekonomi pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan

lapangan kerja bagi penduduk. Sehingga proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak, 2003).

Menurut Blakely (1989), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Menurut Arsyad (1999) dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:

1. Suatu yang dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya, geografisnya dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu negara, disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan meratakan hasil-hasil pembangunan tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Berhasil tidaknya pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerah. Sehingga pembangunan daerah memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan pembangunan nasional.

Menurut teori ekonomi Neo Klasik, ada dua konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas

faktor produksi daerah. Artinya, sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bias mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang memiliki upah tinggi menuju daerah yang memiliki upah rendah. Dalam pembangunan ekonomi modal memegang peranan penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi (Kuncoro, 2002).

2.3. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek

Menurut Adisasmita (2013) Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Menurut Boediono (1999) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Menurut Kuznets dalam Todaro (2000) , pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian- penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Arsyad (1999)

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *gross domestic product* (GDP)/ *gross national product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Terdapat beberapa teori-teori pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan untuk menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, para ahli ekonomi klasik menumpahkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk. Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh. Sumber daya insani mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Sedangkan stok modal menurut Smith, merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber daya alam). Sedangkan pertumbuhan penduduk menurut Adam Smith, yaitu jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya jika tingkat upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Tingkat upah yang

berlaku, menurut Adam Smith, ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran kerja. Sementara itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

2. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori ini dikembangkan oleh Solow, merupakan penyempurnaan teori klasik. Fokus pembahasan teori neo klasik adalah tentang akumulasi modal. Asumsi-asumsi dari model Solow antara lain: 1). Tingkat teknologi dianggap konstan (tidak ada kemajuan teknologi), 2). Tingkat depresiasi dianggap konstan, 3). Tidak ada perdagangan luar negeri atau aliran keluar masuk barang modal, 4). Tidak ada sektor pemerintah, 5). Untuk mempermudah analisis, dapat ditambahkan asumsi bahwa seluruh penduduk bekerja, sehingga jumlah penduduk = jumlah tenaga kerja. Dalam asumsi mempersempit faktor penentu pertumbuhan yang hanya menjadi barang modal dan tenaga kerja.

3. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter, menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensi.

4. Teori Harrod- Domar

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar ada beberapa yang di asumsikan yaitu: 1) Perekonomian dalam keadaan kerja penuh (*full employment*) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh. 2) Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada. 3) Besarnya tabungan masyarakat dan pendapatan nasional adalah proporsional, artinya fungsi tabungan dimulai dari titik nol.

4) Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save MPS*) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal output (*capital- output ratio- COR*) dan rasio pertambahan modal output (*incremental capital-output ratio- ICOR*).

5. Teori Ekonomi Sektor

Teori pertumbuhan ekonomi sektor (*Sector Theory Of Growth*), Teori ini dikembangkan berdasarkan hipotesis Clark Fisher yang mengemukakan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan dibarengi oleh penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor pertanian (sektor primer) dan kenaikan dalam sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dan kemudian dalam industri jasa. Laju pertumbuhan dalam sektor yang mengalami perubahan (*sector Lift*). Dianggap sebagai determinan utama dari perkembangan suatu wilayah.

2.4. Indikator Pertumbuhan Ekonomi wilayah

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Adisasmita (2014), mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakseimbangan Pendapatan Dalam keadaan yang ideal, di mana pendapatan dengan mutlak didistribusikan secara adil, 80 persen populasi terbawah akan menerima 80 persen dari total pendapatan, sedangkan 20 persen populasi teratas menerima 20 persen total pendapatan. Menurut Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB), susunan pengelompokan penduduk dibagi tiga, yaitu 40 persen populasi terendah, 40 persen populasi sedang, dan 20 persen populasi teratas. Indikator ketidakseimbangan pendapatan dapat diterapkan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah.
- b. Perubahan Struktur Perekonomian Dalam masyarakat yang maju, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan akan mengakibatkan perubahan struktur perekonomian, dimana terjadi kecenderungan bahwa kontribusi (peran) sektor pertanian terhadap nilai PDRB akan menurun, sedangkan kontribusi sektor industri akan meningkat. Sektor industri memiliki peranan sangat penting dalam

pembangunan nasional dan regional, sektor industri dapat menyediakan lapangan kerja yang luas, memberikan peningkatan pendapatan kepada masyarakat, menghasilkan devisa yang dihasilkan dari ekspor. Oleh karena itu, perekonomian suatu wilayah harus di orientasikan selain sektor pertanian, tetapi harus pula diorientasikan kepada sektor industri.

- c. Pertumbuhan Kesempatan Kerja Masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, tingkat pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial Negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, diperlukan peranan pemerintah. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah pembangunan prasarana (misalnya jalan). Pembangunan jalan yang menjangkau ke seluruh kantong-kantong produksi, akan mendorong peningkatan produksi berbagai komoditas sektor pertanian dalam arti luas (meliputi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan) serta barang-barang hasil industri. Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan menunjang berkembangnya berbagai kegiatan di sektor-sektor lainnya (pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan lainnya).
- d. Tingkat dan Penyebaran Kemudahan Dalam hal ini “kemudahan” diartikan sebagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari (seperti sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, kesempatan melakukan ibadah, rekreasi dan sebagainya), maupun pemenuhan kebutuhan untuk dapat melakukan kegiatan usaha misalnya mendapatkan bahan baku, bahan penolong, suku cadang, listrik, air bersih, dan jasa-jasa seperti jasa angkutan, pemasaran, perbankan dan lainnya)
- e. Produk Domestik Regional Bruto Salah satu konsep yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi regional (wilayah) adalah konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB

merupakan ukuran prestasi (keberhasilan) ekonomi dari seluruh kegiatan ekonomi.

2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, dan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (a) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (b) konsumsi pemerintah, (c) pembentukan modal tetap domestik bruto, (d) perubahan inventori, dan (e) ekspor neto, (ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor).

Secara konsep, tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. PDRB dengan pendekatan Produksi mengelompokkan kategori lapangan usaha menjadi 17 kategori.

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya;
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Perubahan tahun dasar dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan baik pada tatanan global maupun lokal yang berpengaruh pada perekonomian nasional. PDRB tahun dasar 2010 berpedoman pada Sistem Neraca Nasional (SNN) 2008. SNN 2008 adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi.

Implikasi dari perubahan harga tahun dasar memberikan dampak, antara lain: meningkatkan nominal PDB/PDRB yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu negara/wilayah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi, dan pergeseran struktur perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan

2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut: secara umum perekonomian Indonesia relatif stabil; selama 10 (sepuluh) tahun terakhir telah terjadi perubahan struktur ekonomi terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru; rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun; teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008; tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan indeks harga produsen (producer price index/PPI); dan tersedianya kerangka kerja SUT yang digunakan untuk *benchmarking*/menetapkan PDB/PDRB.

2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Antar Kecamatan

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai macam aktivitas ekonomi pada suatu kecamatan. Data PDRB merupakan gambaran kemampuan kecamatan untuk mengelola Sumber daya alam yang dimiliki untuk menjadi suatu proses produksi. Adanya perbedaan nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kecamatan sangat dipengaruhi oleh potensi Sumber daya ekonomi yang berupa Sumber daya tenaga kerja (labor) dan Sumber daya modal atau capital (capital) yang ada di kecamatan tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan data yang belum lengkap tersedia di Kecamatan tersebut menyebabkan nilai PDRB beberapa sektor menggunakan alokator yang tersedia di tingkat Kabupaten.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Disain Penelitian

Disain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Di dalam kajian ini, disain penelitian yang dimaksud adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dipilih dalam rangka memberikan gambaran mengenai data yang sudah dikumpulkan mengenai PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2013 - 2023.

3.2. Variabel Penelitian

Di dalam kajian ini terdapat beberapa variabel yang diamati dan dianalisis, diantaranya adalah: PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan dan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2013 - 2023 menurut lapangan usaha dan pengeluaran/penggunaan, pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dan pengeluaran/penggunaan.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan untuk menganalisis PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Data Primer dan data Sekunder. data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statitistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Data dikumpulkan dengan cara mengunduh berbagai publikasi yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten hulu Sungai di laman instansi-instansi tersebut. Selain itu, data juga diperoleh dari Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan dan Dinas Dinas yang terkait dengan Penelitian. Selain Data sekunder juga digunakan data primer berupa hasil survei yang dilakukan terhadap usaha/perusahaan di semua sektor ekonomi yang dilakukan secara sampel.

3.4. Metode Analisa Data PDRB Kecamatan Sekabupaten Hulu Sungai Selatan 2013 - 2023

Penyusunan PDRB Kecamatan ini dilakukan melalui survei yang dilakukan terhadap usaha/perusahaan di semua sektor ekonomi yang dilakukan secara sampel. Adapun teknik penghitungannya sendiri dilakukan dengan metode alokasi

dari PDRB Kabupaten dengan menggunakan alokator-alokator tertentu seperti nilai produksi atau nilai tambah atau jumlah tenaga kerja dari setiap sektor yang ada di tiap kecamatan. Penyajian datanya sendiri berdasarkan kategori yaitu sebanyak 17 kategori dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

Selain itu, menurut Fajar (2016) Ada dua pendekatan untuk mengestimasi PDRB level kecamatan, yaitu:

a. Pendekatan Konsumsi Rumah Tangga

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan dari konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor netto. Oleh karena itu, pendekatan konsumsi rumah tangga dapat dijadikan dasar untuk mengestimasi PDRB level kecamatan. Sebagai implikasi penggunaan pendekatan itu, data yang dibutuhkan adalah:

- 1) Konsumsi per kapita perbulan dari Susenas;
- 2) Jumlah penduduk menurut kecamatan;
- 3) Berdasarkan poin (1) dan (2) kita dapat menurunkan share konsumsi rumah tangga perkecamatan terhadap konsumsi rumah tangga total.

Sehingga:

$$\text{PDRB}_{\text{kecamatan } i} = (\text{share konsumsikecamatan } i) / 100 * \text{PDRB}_{\text{kabupaten}} \dots (1)$$

b. Pendekatan Penduduk Yang Bekerja

Salah satu arti PDRB menurut produksi adalah total seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi. Tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi produksi selain modal dan teknologi. Supply dari tenaga kerja adalah penduduk, dalam hal ini penduduk usia kerja (penduduk 15 tahun ke atas). Konsekuensi untuk mengestimasi PDRB level kecamatan dengan menganggap faktor selain tenaga adalah *ceteris paribus*, jadinya hanya faktor tenaga kerja yang berpengaruh terhadap output produksi dan faktor lainnya konstan. Sehingga PDRB level kecamatan tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dimiliki tiap kecamatannya.

$$\text{PDRB}_{\text{kecamatan } i} = \text{share pekerjakecamatan } i * \text{PDRB}_{\text{kabupaten}} \dots (2)$$

Atas dasar hal itu diperlukan data jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja per kecamatan.

c. Kompromi Hasil Estimasi

Berbeda penggunaan metode penghitungan tentu akan berbeda pula angka yang dihasilkan. Tentunya angka yang dihasilkan dari kedua pendekatan tersebut berbeda sehingga untuk mengkompromikannya dengan meratakan hasil kedua estimasi tersebut. Setelah diperoleh angka PDRB per kecamatan bagaimana menurunkannya menjadi ke dalam sektor-sektor, hal itu dapat dilakukan dengan cara iterative proportional fitting (IPF) berdasarkan distribusi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut sektor dan kecamatan hasil sensus penduduk.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Kondisi Umum Daerah

Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Pada Tanggal 29 Juni 1950 Nomor C/17/15/3 wilayah Kalimantan dibagi menjadi 6 Kabupaten Administratif dan 3 Swapraja. Salah satu dari 6 kabupaten tersebut adalah Afdeling Van Hoeloe Soengai dibentuk menjadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan ibu kota Kandangan.

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara geografis terbagi menjadi dua wilayah, dimana di bagian timur ke selatan terdapat pegunungan yang memanjang sedangkan dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah yang didominasi dengan rawa-rawa. Dengan kondisi seperti itu menyebabkan udara di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 cenderung lembab dimana nilai kelembabannya berkisar 42,30 persen hingga 99,50 persen dengan rata-rata sebesar 77,11 persen. Selain itu, rata-rata suhu tertinggi sekitar 37,10 C pada bulan Oktober sedangkan rata-rata suhu terendah sekitar 22,10 C terjadi pada bulan September.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 Km sebelah utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan. Hal ini merupakan potensi pengembangan daerah yang harus digali sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

4.1.2 Kondisi Geografi Daerah

4.1.2.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sebesar 180.994 Ha atau 1.809,94 km². Wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 11 wilayah administrasi tingkat Kecamatan, 144 Desa dan 4 Kelurahan dengan pusat pemerintahan sekaligus ibukotanya yakni Kota Kandangan. Secara

rinci wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1.
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Kelurahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM2)	DESA/KELURAHAN
1	Padang Batung	203,93	17
2	Loksado	338,89	11
3	Telaga Langsat	58,08	11
4	Angkinang	58,4	11
5	Kandangan	106,71	18
6	Sungai Raya	80,96	18
7	Simpur	82,35	11
8	Kalumpang	135,07	9
9	Daha Selatan	322,82	16
10	Daha Barat	149,62	7
11	Daha Utara	268,11	19
	JUMLAH	1804,94	148

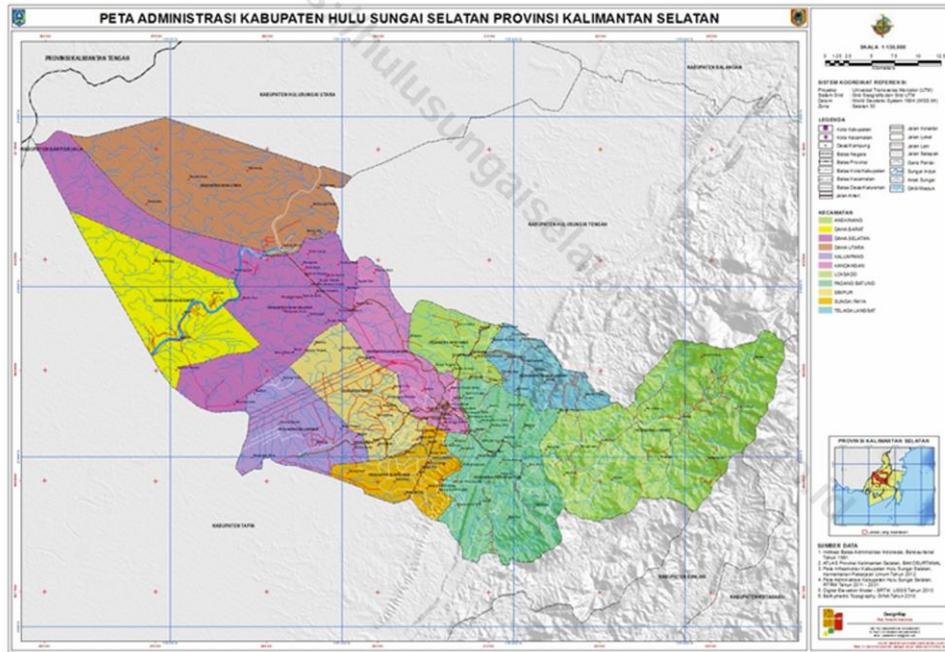
Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

4.1.2.2. Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara 02029'59" sd -02056'10"LS dan 114051'19"BT sd 115036'19"BT. Dimana Kota Kandangan terletak 2°47'LS - 115°40'BT yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito. Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara
 Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kotabaru
 Sebelah selatan : Kabupaten Tapin
 Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin

Gambar 4.1.
Peta Administrasi Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2024

4.1.3. Demografi

Jumlah Penduduk Menurut BPS, penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Berikut merupakan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan per Kecamatan periode 2013 sampai 2023 :

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Periode Tahun 2013 – 2023

NO	KECAMATAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padang Batung	20.337	20.603	20.847	21.092	21.330	21.558	21.769	21.424	21.656	21.918	22.470
2	Loksado	8.582	8.715	8.839	8.968	9.094	9.219	9.340	8.454	8.496	8.548	8.869
3	Telaga Langsat	9.362	9.493	9.619	9.750	9.882	10.013	10.140	10.199	10.346	10.508	10.594
4	Angkinang	17.342	17.537	17.718	17.905	18.090	18.271	18.442	18.561	18.780	19.024	19.437
5	Kandangan	48.583	49.181	49.737	50.293	50.840	51.364	51.847	48.866	49.204	49.604	50.382
6	Sungai Raya	17.014	17.204	17.379	17.558	17.737	17.913	18.082	18.047	18.277	18.533	18.450
7	Simpurn	14.311	14.436	14.550	14.668	14.785	14.896	15.000	15.222	15.385	15.568	15.700
8	Kalumpang	6.212	6.263	6.309	6.357	6.402	6.446	6.486	6.522	6.586	6.658	6.674
9	Daha Selatan	40.823	41.395	41.939	42.498	43.050	43.592	44.106	40.802	41.014	41.276	42.883
10	Daha Barat	7.563	7.685	7.799	7.915	8.029	8.140	8.247	7.974	8.063	8.164	8.168
11	Daha Utara	31.485	31.962	32.417	32.885	33.348	33.805	34.243	31.935	32.153	32.411	33.692
	JUMLAH	221.614	224.474	227.153	229.889	232.587	235.217	237.702	228.006	229.960	232.212	237.319

Sumber : BPS Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa penduduk kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 2013 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan antara 0,98 % sampai dengan 2,20 %. Kecamatan yang jumlah penduduknya paling banyak adalah kecamatan Kandangan dengan proporsi rata-rata penduduk yang tinggal disana sebesar 49.991 jiwa atau sebesar 21,68% yang merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perkotaan, diikuti oleh Kecamatan Daha Selatan sebesar 18,27 % dan Kecamatan Daha Utara sebesar 14,21 % yang merupakan pusat kegiatan di wilayah tiga Daha. Sedangkan yang penduduknya paling sedikit adalah kecamatan Kalumpang rata-rata sebesar 6.447 Jiwa atau 2,80 % dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selama Periode 2013 sampai periode 2024 kepadatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan rata-rata sebesar 128 orang /KM2 dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Kandangan dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 468 orang / KM2 dan kepadatan penduduk terendah sebesar 26 orang /KM2 di Kecamatan Loksado.

**Tabel 4.3.
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Periode Tahun 2013 – 2023**

NO	KECAMATAN	TAHUN											RATA2
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Padang Batung	100	101	102	103	105	106	107	105	106	107	110	105
2	Loksado	25	26	26	26	27	27	28	25	25	25	26	26
3	Telaga Langsat	161	163	166	168	170	172	175	176	178	181	182	172
4	Angkinang	297	300	303	307	310	313	316	318	322	326	333	313
5	Kandangan	455	461	466	471	476	481	486	458	461	465	472	468
6	Sungai Raya	210	213	215	217	219	221	223	223	226	229	228	220
7	Simpur	174	175	177	178	180	181	182	185	187	189	191	182
8	Kalumpang	46	46	47	47	47	48	48	48	49	49	49	48
9	Daha Selatan	126	128	130	132	133	135	137	126	127	128	133	130
10	Daha Barat	51	51	52	53	54	54	55	53	54	55	55	53
11	Daha Utara	117	119	121	123	124	126	128	119	120	121	126	122
	Kabupaten HSS	123	124	126	127	129	130	132	126	127	129	131	128

Sumber : BPS Kab Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

Gambar 4.2.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kab. Hulu Sungai Selatan



Sumber : BPS Kab Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

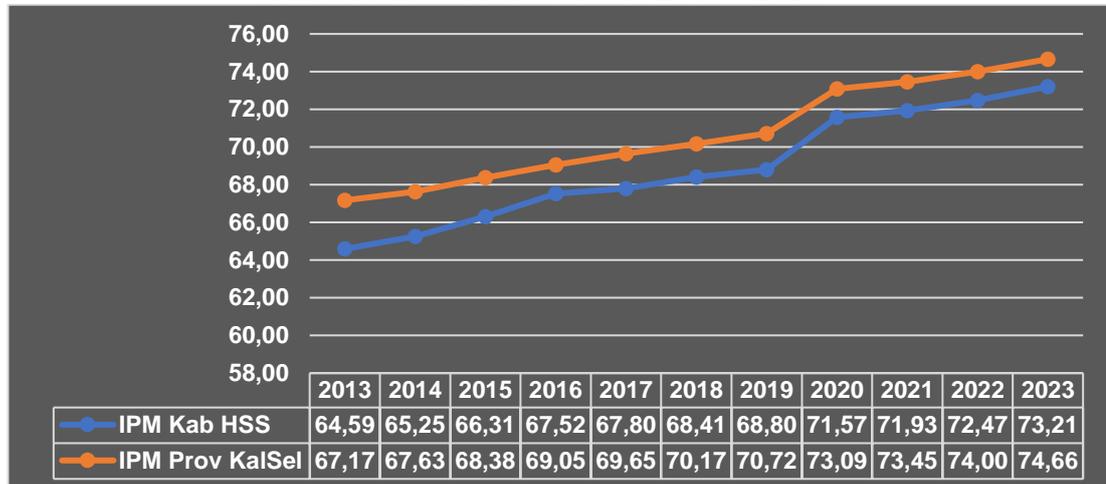
4.2. Aspek Kesejahteraan Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan sosial disuatu wilayah harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan. Salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia yang dibentuk dari tiga dimensi yaitu Dimensi Kesehatan meliputi Indeks Kesehatan, Dimensi Pendidikan meliputi Indeks Pendidikan yang meliputi Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah, serta yang terakhir adalah Dimensi Ekonomi yaitu Pengeluaran Perkapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang disusun dengan menggunakan pendekatan model adaptasi dari *The United Nations Development Programme* (UNDP) dalam menghitung *Human Development Index* (HDI). Berikut IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat perkembangannya pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3.
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Hulu Sungai Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2013 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Data diolah

Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013 IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 64,59 meningkat menjadi 73,21 pada tahun 2023.

Tabel 4.4.
Indikator Pembentuk IPM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2013 – 2023

Tahun	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita
2013	63,55	11,35	7,05	11.006
2014	63,64	11,68	7,21	11.077
2015	64,14	11,83	7,67	11.161
2016	65,38	12,02	7,68	11.623
2017	65,39	12,05	7,71	11.890
2018	65,39	12,07	7,72	12.535
2019	65,82	12,10	7,74	12.835
2020	71,64	12,17	7,75	12.672
2021	71,78	12,38	7,76	12.736
2022	72,15	12,40	7,79	13.157
2023	72,52	12,46	7,86	13.743

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan data diolah

Berdasarkan dimensi pembentuknya, pada dimensi kesehatan yaitu Angka harapan hidup (AHH) di Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2013 Angka Harapan hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 63,55 Tahun meningkat menjadi 72,52 Tahun yang berarti bahwa AHH masyarakat kabupaten Hulu Sungai Selatan semakin baik. Pada dimensi Ekonomi yaitu pada angka pengeluaran perkapita di Hulu Sungai Selatan dari tahun 2013 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dari Rp 11.006.000 per Jiwa pertahun meningkat menjadi Rp 13.743.000 per Jiwa Pertahun. Pada dimensi pendidikan, seluruh komponen penyusunnya yang meliputi Rata-rata Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2013 hingga tahun 2023 memiliki tren naik setiap tahunnya. Pada tahun 2023 Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten hulu Sungai Selatan adalah 7,86 tahun atau kelas 2 SMP. Ini berarti bahwa Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih ada yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar 9 tahun.

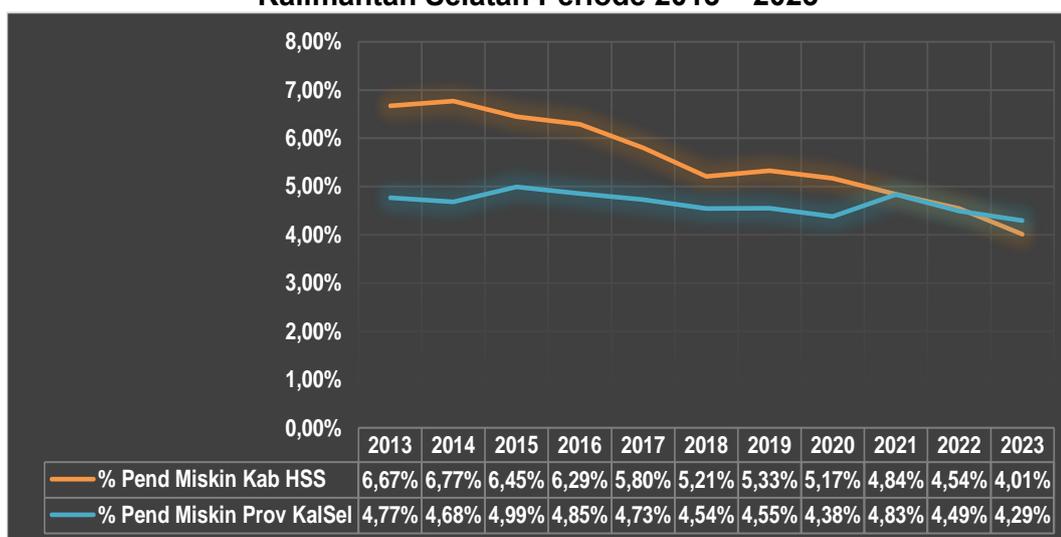
4.2.2. Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dengan pengeluaran. Ukuran kemiskinan yaitu menggunakan Garis kemiskinan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM), dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran yang di hasilkan dari nilai kebutuhan minimum makanan yang di hitung dalam 2.100 kalori perkapita per hari, sedangkan garis kemiskinan non makanan di hitung dari kebutuhan minimum untuk sandang, pendidikan, dan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan. Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik disetiap tahunnya. Pada Tahun 2023 tingkat

kemiskinan kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 4,01 % lebih rendah dibandingkan Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Sebesar 4,29 %. Hal ini merupakan hal yang positif, mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah kondisi sandang, pangan dan papan penduduk, tingkat pendidikan, dan derajat kesehatan.

Gambar 4.4.
Persentase Penduduk Miskin Kab. Hulu Sungai Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2013 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan data diolah

Pada tabel 4.5. dapat diketahui perkembangan Jumlah penduduk miskin, Garis Kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa jumlah penduduk miskin dari tahun 2013 sebesar 14.836 jiwa penduduk menurun menjadi 9.607 jiwa penduduk. Sedangkan garis kemiskinan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 332.312 per Jiwa Per bulan pada Tahun 2013 meningkat menjadi Rp 547.855 per Jiwa Per bulan di Tahun 2023. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan dari tahun 2013 sampai tahun 2023 berfluktuasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Penurunan nilai

indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata – rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Pada Tahun 2013 P1 0,87 meningkat menjadi 0,93 tahun 2014. Tahun 2015 P1 mengalami penurunan menjadi 0,61 tetapi naik lagi menjadi 0,88 ditahun 2016. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 P1 cenderung mengalami penurunan menjadi 0,45. Tetapi ditahun 2022 naik menjadi 0,49 dan pada tahun 2023 P1 menjadi 0,69. Selanjutnya adalah indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. P2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi yang tertinggi ditahun 2014 yaitu sebesar 0,23 sedangkan yang terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,06. Pada tahun 2023 P2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebesar 0,21 meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 0,09.

**Tabel 4.5.
Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan
Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2013-2023**

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2013	6,67%	14.836	332.312	0,87	0,17
2014	6,77%	15.233	351.691	0,93	0,23
2015	6,45%	14.590	365.097	0,61	0,09
2016	6,29%	14.420	409.235	0,88	0,21
2017	5,80%	13.447	431.296	0,7	0,14
2018	5,21%	12.224	444.455	0,71	0,18
2019	5,33%	12.636	461.581	0,72	0,15
2020	5,17%	12.385	528.622	0,51	0,09
2021	4,84%	11.466	494.203	0,45	0,06
2022	4,54%	10.804	516.857	0,49	0,09
2023	4,01%	9.607	547.855	0,69	0,21

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan data diolah

4.2.3. Indeks Gini

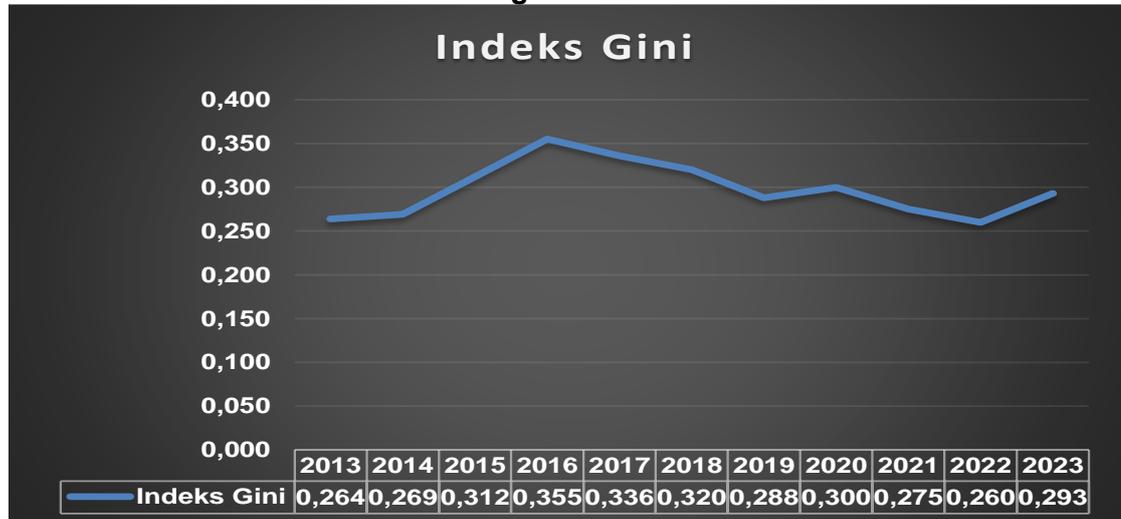
Indeks Gini atau Gini Ratio merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Penghitungan Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a) Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
- b) Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat etimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius, dan jika rasio berkisar 0,30 – 0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 nilai Indeks Gini sebesar 0,293. Nilai Indeks Gini dari tahun 2013 – 2016 memiliki trend meningkat dari 0,264 menjadi 0,355 pada tahun 2016. Pada Tahun 2017 - 2022 memiliki tren yang relatif menurun, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan pada indeks kedalaman dan indeks keparahan yang juga mengalami kenaikan. Kenaikan gini ratio terjadi dengan makin melebarnya jarak pengeluaran penduduk miskin dengan penduduk golongan menengah atas. Nilai gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih dibawah angka 0,350 berada pada level rendah. Hal ini menggambarkan distribusi pendapatan penduduk kabupaten Hulu Sungai Selatan ketimpangannya rendah.

Gambar 4.5.
Indeks Gini Kab. Hulu Sungai Selatan Periode 2013 – 2023



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan data diolah

4.3. Kinerja Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu dimensi sasaran pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan menggunakan indikator pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2013 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada gambar 4.6. Selama Periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami trend meningkat dari 5,68 persen tahun 2013 menjadi 5,79 persen pada tahun 2014 dan menjadi 6,05 persen ditahun 2015.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai

PDRB Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 4,21 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 3,97 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mencapai 6,08 persen.

Namun ditahun 2019 Laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,28 persen dan pada saat Pandemi Covid 19 terjadi pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan -1,19 persen. Pada tahun 2021 perekonomian di negara Indonesia mulai pada tahap pemulihan ditunjang dengan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan percepatan program vaksinasi covid 19 dibuka seluas-luasnya sehingga aktivitas produksi mulai mendekati normal. Hal ini berlanjut pada tahun 2022 kegiatan produksi sudah mulai berjalan normal. Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 5,04 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 4,84 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 4,02 persen. Akan tetapi mengalami perlambatan laju pertumbuhan ekonomi atau peningkatannya lebih rendah dibandingkan peningkatan tahun 2021.

Selanjutnya, pada tahun 2023 Nilai PDRB Berdasarkan harga konstan 2010 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan mencapai sebesar 5,31 Triliun rupiah dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,04 Triliun rupiah atau terjadi pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,27 persen. Jika dibandingkan dengan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung lebih tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan kabupaten Hulu Sungai Selatan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 4.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Hulu Sungai Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2012 – 2023



Sumber : BPS Kab Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

Tabel 4.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2013– 2023 (Persen)

Lapangan Usaha	LPE Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,63%	4,37%	4,03%	4,83%	1,67%	4,33%	2,62%	0,19%	-0,01%	-0,52%	4,54%
Pertambangan dan Penggalian	35,79%	9,09%	10,98%	15,67%	19,25%	15,44%	7,70%	-6,20%	13,35%	6,63%	8,78%
Industri Pengolahan	2,12%	3,51%	4,44%	5,38%	5,85%	4,57%	4,36%	-3,56%	5,93%	5,25%	5,34%
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,25%	22,02%	22,44%	5,58%	3,02%	6,96%	4,45%	4,26%	4,72%	7,21%	7,56%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,77%	8,34%	6,83%	2,87%	3,00%	5,48%	6,84%	8,19%	4,89%	4,72%	2,33%
Konstruksi	5,07%	5,09%	5,18%	4,48%	5,09%	4,32%	5,93%	-3,48%	6,15%	5,57%	6,51%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,30%	5,85%	4,76%	4,60%	5,28%	5,17%	5,09%	-2,45%	5,40%	8,14%	4,14%
Transportasi dan Pergudangan	7,09%	5,53%	5,51%	4,93%	6,45%	5,43%	5,57%	-2,61%	4,56%	5,73%	6,15%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,62%	6,69%	6,72%	6,79%	7,22%	6,49%	8,06%	-2,26%	4,08%	11,90%	6,26%
Informasi dan Komunikasi	7,87%	8,43%	8,79%	7,80%	8,07%	6,45%	8,29%	8,92%	7,76%	6,64%	6,03%
Jasa Keuangan dan Asuransi	13,66%	6,63%	4,23%	5,34%	2,76%	2,65%	3,82%	1,14%	1,60%	-1,24%	10,17%
Real Estat	8,68%	5,44%	5,78%	4,24%	5,75%	4,30%	5,78%	5,62%	3,65%	4,97%	3,35%
Jasa Perusahaan	4,30%	6,93%	6,74%	8,01%	6,74%	4,21%	4,85%	-1,54%	2,15%	6,51%	7,37%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76%	5,73%	8,64%	2,02%	2,54%	3,77%	5,49%	-2,78%	-1,72%	0,14%	2,20%
Jasa Pendidikan	7,46%	7,38%	6,79%	6,07%	6,30%	5,01%	5,33%	0,17%	0,23%	1,02%	0,59%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,56%	6,63%	6,38%	7,72%	9,57%	7,13%	8,62%	9,86%	6,74%	9,56%	6,97%
Jasa lainnya	3,60%	7,69%	5,96%	7,15%	8,59%	6,97%	7,11%	-1,07%	3,30%	6,95%	4,63%
PDRB	5,68%	5,79%	6,05%	6,08%	6,12%	6,14%	5,28%	-1,19%	4,19%	4,02%	5,27%

Sumber : BPS Kab Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

Selanjutnya, pada tabel 4.6. diketahui Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan jika dirinci menurut kategori Lapangan Usaha Tahun 2013-2023. Berdasarkan tabel 4.6. diketahui bahwa laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode tersebut mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi diraih oleh kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 35,79 % diikuti oleh Kategori Jasa keuangan dan Asuransi sebesar 13,66 %. Sedangkan laju Pertumbuhan Ekonomi terendah pada tahun 2013 adalah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -2,63 %.

Pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,12 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang mencapai 6,08 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 19,24 persen. Hal ini disebabkan karena nilai tambah tambang yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Dua belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga 19 persen. Sedangkan sisanya tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen. Beberapa lapangan usaha yang memerlukan perhatian khusus dikarenakan pertumbuhannya masih cukup rendah, yaitu dibawah 5 persen antara lain adalah: Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 2,06 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,98; Pengadaan Air, Pengelolaan sampah limbah dan daur ulang sebesar 3,04 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,76 persen; Administrasi Pertahanan dan Jaminan sebesar 2,54 persen.

Jika dilihat dari tren, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 4,02 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan pada kategori Pertambangan dan Penggalian, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor ; industri pengolahan dan konstruksi yang merupakan sektor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beberapa lapangan usaha yang memerlukan perhatian khusus dikarenakan pertumbuhannya masih cukup rendah, yaitu antara lain adalah: Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar -0,49 persen. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, tumbuh negatif walaupun negatifnya tidak mencapai 1 persen. Kategori ini

merupakan kategori yang sharenya paling besar pada PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebagai kategori yang sharenya paling besar, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan juga menjadi salah satu penentu laju atau melambat atau menurunnya pertumbuhan total PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadi kategori lapangan usaha yang paling banyak diusahakan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan pertumbuhan ekonomi kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan sebesar 5,27 persen. Peningkatan ini disebabkan karena terjadi peningkatan pertumbuhan pada semua kategori lapangan usaha seperti kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kategori Pertambangan dan Penggalian, serta jasa Keuangan dan Asuransi.

Bila dilihat pada tabel 4.7. kategori perekonomian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 sampai dengan 2023 terbagi menjadi 4 (empat) kelompok pertumbuhan yaitu: Kategori Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah. Pada tahun 2023 kategori Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Kelompok LPE kategori perekonomian yang sangat tinggi yaitu LPE yang berada di atas LPE Umum PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebesar 5,27% dan berada di atas 10 %. Kategori perekonomian dalam kelompok LPE sangat tinggi ini adalah: Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,17 persen
2. Kelompok LPE kategori perekonomian yang tinggi yaitu LPE yang berada di atas LPE Umum PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebesar 5,27% tetapi dibawah angka 10 %. Kategori perekonomian dalam kelompok LPE tinggi ini adalah kategori :
 - a. Pertambangan dan Penggalian
 - b. Industri Pengolahan
 - c. Pengadaan Listrik dan Gas
 - d. Konstruksi
 - e. Transportasi dan Pergudangan
 - f. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 - g. Informasi dan Komunikasi
 - h. Jasa Perusahaan
 - i. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

3. Kelompok LPE kategori perekonomian yang sedang yaitu LPE yang berada di bawah LPE Umum PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebesar 5,27% tetapi tetap tumbuh dengan persentase LPE Positif. Kategori perekonomian dalam kelompok LPE sedang ini adalah kategori:
 - a. Pertanian, kehutanan dan perikanan
 - b. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 - c. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 - d. Real Estat
 - e. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
 - f. Jasa Pendidikan
 - g. Jasa Lainnya
4. Kelompok LPE kategori perekonomian yang rendah yaitu LPE yang berada di bawah LPE Umum PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebesar 5,27% dan dengan persentase LPE negatif. Kategori perekonomian dalam kelompok LPE rendah pada tahun 2023 tidak ada.

Tabel 4.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Dirinci Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2023

Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	LPE	Kategori	LPE	Kategori	LPE	Kategori	LPE	Kategori	LPE	Kategori	LPE	Kategori										
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,63%	Rendah	4,37%	Sedang	4,03%	Sedang	4,83%	Sedang	1,67%	Sedang	4,33%	Sedang	2,62%	Sedang	0,19%	Sedang	-0,01%	Rendah	-0,52%	Rendah	4,54%	Sedang
Pertambangan dan Penggalian	35,79%	Sangat Tinggi	9,09%	Tinggi	10,98%	Sangat Tinggi	15,67%	Sangat Tinggi	19,25%	Sangat Tinggi	15,44%	Sangat Tinggi	7,70%	Tinggi	-6,20%	Rendah	13,35%	Sangat Tinggi	6,63%	Tinggi	8,78%	Tinggi
Industri Pengolahan	2,12%	Sedang	3,51%	Sedang	4,44%	Sedang	5,38%	Sedang	5,85%	Sedang	4,57%	Sedang	4,36%	Sedang	-3,56%	Rendah	5,93%	Tinggi	5,25%	Tinggi	5,34%	Tinggi
Pengadaan Listrik dan Gas	-2,25%	Rendah	22,02%	Sangat tinggi	22,44%	Sangat Tinggi	5,58%	Sedang	3,02%	Sedang	6,96%	Tinggi	4,45%	Sedang	4,26%	Tinggi	4,72%	Tinggi	7,21%	Tinggi	7,56%	Tinggi
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,77%	Sedang	8,34%	Tinggi	6,83%	Tinggi	2,87%	Sedang	3,00%	Sedang	5,48%	Sedang	6,84%	Tinggi	8,19%	Tinggi	4,89%	Tinggi	4,72%	Tinggi	2,33%	Sedang
Konstruksi	5,07%	Sedang	5,09%	Sedang	5,18%	Sedang	4,48%	Sedang	5,09%	Sedang	4,32%	Sedang	5,93%	Tinggi	-3,48%	Rendah	6,15%	Tinggi	5,57%	Tinggi	6,51%	Tinggi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,30%	Tinggi	5,85%	Tinggi	4,76%	Sedang	4,60%	Sedang	5,28%	Sedang	5,17%	Sedang	5,09%	Sedang	-2,45%	Rendah	5,40%	Tinggi	8,14%	Tinggi	4,14%	Sedang
Transportasi dan Pergudangan	7,09%	Tinggi	5,53%	Sedang	5,51%	Sedang	4,93%	Sedang	6,45%	Tinggi	5,43%	Sedang	5,57%	Tinggi	-2,61%	Rendah	4,56%	Tinggi	5,73%	Tinggi	6,15%	Tinggi
Minum	5,62%	Sedang	6,69%	Tinggi	6,72%	Tinggi	6,79%	Tinggi	7,22%	Tinggi	6,49%	Tinggi	8,06%	Tinggi	-2,26%	Rendah	4,08%	Sedang	11,90%	Sangat Tinggi	6,26%	Tinggi
Informasi dan Komunikasi	7,87%	Tinggi	8,43%	Tinggi	8,79%	Tinggi	7,80%	Tinggi	8,07%	Tinggi	6,45%	Tinggi	8,29%	Tinggi	8,92%	Tinggi	7,76%	Tinggi	6,64%	Tinggi	6,03%	Tinggi
Jasa Keuangan dan Asuransi	13,66%	Sangat Tinggi	6,63%	Tinggi	4,23%	Sedang	5,34%	Sedang	2,76%	Sedang	2,65%	Sedang	3,82%	Sedang	1,14%	Tinggi	1,60%	Sedang	-1,24%	Rendah	10,17%	Sangat Tinggi
Real Estat	8,68%	Tinggi	5,44%	Sedang	5,78%	Sedang	4,24%	Sedang	5,75%	Tinggi	4,30%	Sedang	5,78%	Tinggi	5,62%	Tinggi	3,65%	Sedang	4,97%	Tinggi	3,35%	Sedang
Jasa Perusahaan	4,30%	Sedang	6,93%	Tinggi	6,74%	Tinggi	8,01%	Tinggi	6,74%	Sedang	4,21%	Sedang	4,85%	Sedang	-1,54%	Rendah	2,15%	Sedang	6,51%	Tinggi	7,37%	Tinggi
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,76%	Tinggi	5,73%	Sedang	8,64%	Tinggi	2,02%	Sedang	2,54%	Sedang	3,77%	Sedang	5,49%	Tinggi	-2,78%	Rendah	-1,72%	Rendah	0,14%	Sedang	2,20%	Sedang
Jasa Pendidikan	7,46%	Tinggi	7,38%	Tinggi	6,79%	Tinggi	6,07%	Sedang	6,30%	Tinggi	5,01%	Sedang	5,33%	Tinggi	0,17%	Sedang	0,23%	Sedang	1,02%	Sedang	0,59%	Sedang
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,56%	Tinggi	6,63%	Tinggi	6,38%	Tinggi	7,72%	Tinggi	9,57%	Tinggi	7,13%	Tinggi	8,62%	Tinggi	9,86%	Tinggi	6,74%	Tinggi	9,56%	Tinggi	6,97%	Tinggi
Jasa lainnya	3,60%	Sedang	7,69%	Tinggi	5,96%	Sedang	7,15%	Tinggi	8,59%	Tinggi	6,97%	Tinggi	7,11%	Tinggi	-1,07%	Sedang	3,30%	Sedang	6,95%	Tinggi	4,63%	Sedang
PDRB	5,68%		5,79%		6,05%		6,08%		6,12%		6,14%		5,28%		-1,19%		4,19%		4,02%		5,27%	

Sumber : BPS Kab Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

4.3.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi secara kuantitatif bisa digambarkan dengan menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing Sektor terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur ekonomi dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB sektoral yang menunjukkan peranan dan sumbangan masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah. Tabel 4.6. memperlihatkan Struktur Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2013 sampai dengan Periode 2023 berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.

Berdasarkan Tabel 4.8. Diketahui bahwa Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rata-rata sebesar 24,82 persen diikuti oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata 11,84 persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,28 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun selama sepuluh tahun terakhir besarnya kontribusi kategori ini cenderung mengalami penurunan sebesar 7,03 persen dibandingkan tahun 2013. Bahkan pada tahun 2023 kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB melebihi kontribusi Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Hal ini memperlihatkan terjadinya pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan menjadi Kategori Pertambangan dan Penggalian . Tahun 2022, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh negatif atau kontraksi sebesar -0,52 persen. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar -0,01 persen. Tahun 2022 merupakan laju pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan produksi tanaman padi dan hortikultura yang cukup besar. Penurunan produksi ini disebabkan oleh terjadinya gagal panen atau puso yang diakibatkan oleh hama wereng dan anomali cuaca yang tidak menentu di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 4.8.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2013 – 2023

Lapangan Usaha	Persentase PDRB menurut Kategori Lapangan Usaha Atas dasar Harga Berlaku											
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,51	27,02	27,07	26,96	25,63	25,13	24,56	24,82	23,31	20,49	20,48	24,82
Pertambangan dan Penggalian	9,41	9,27	8,41	8,69	9,90	10,79	10,37	9,72	12,69	20,47	20,53	11,84
Industri Pengolahan	8,05	7,96	8,03	8,21	8,39	8,11	8,01	7,86	7,97	7,38	7,26	7,93
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,35	0,36	0,37	0,35	0,34	0,34	0,35	0,38	0,37	0,33	0,31	0,35
Konstruksi	7,79	7,94	8,12	7,99	7,92	7,92	8,06	7,82	7,88	7,37	7,35	7,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,25	9,31	9,23	9,13	9,21	9,26	9,41	9,33	9,27	9,18	9,51	9,28
Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,25	5,19	5,13	5,19	5,16	5,23	5,16	5,02	4,72	5,10	5,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,45	3,57	3,60	3,58	3,60	3,65	3,82	3,83	3,73	3,60	3,58	3,64
Informasi dan Komunikasi	4,20	4,29	4,24	4,28	4,36	4,36	4,53	4,91	4,91	4,50	4,44	4,46
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,06	2,13	2,02	2,04	2,02	2,00	1,98	1,99	1,96	1,75	1,81	1,98
Real Estat	2,52	2,52	2,50	2,44	2,40	2,36	2,41	2,59	2,51	2,27	2,20	2,43
Jasa Perusahaan	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,55	9,54	10,06	9,70	9,38	9,28	9,34	9,28	8,51	7,34	7,18	9,01
Jasa Pendidikan	7,07	7,17	7,31	7,55	7,58	7,51	7,65	7,74	7,32	6,32	5,91	7,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,88	1,94	2,03	2,08	2,14	2,16	2,25	2,51	2,55	2,42	2,44	2,22
Jasa lainnya	1,52	1,58	1,64	1,68	1,74	1,76	1,84	1,85	1,79	1,68	1,70	1,71
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Hulu Sungai Selatan cukup tinggi selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir. Rata-rata kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB selama periode 2013 sampai dengan 2023 sebesar 11,84 persen. Kontribusi kategori ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 kontribusi kategori ini sebesar 12,69 persen meningkat menjadi 20,47 persen pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 kontribusi kategori ini menjadi 20,53 persen melebihi kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Selanjutnya kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori penyumbang kontribusi terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rata-rata kontribusi sebesar 9,28 persen. Besarnya peranan PDRB kategori lapangan usaha perdagangan juga didukung oleh adanya dua pasar besar/utama yang berada di kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu

pasar Kandungan dan pasar Nagara. Selain itu, peningkatan perdagangan juga sejalan dengan lancarnya pendistribusian barang-barang di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta adanya peningkatan biaya distribusi barang karena adanya kenaikan harga BBM. Kontribusi kategori ini cenderung stabil diangka 9 persen.

Kategori yang kontribusinya rendah terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,07 persen, Jasa Perusahaan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,12 persen dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,35 %

4.3.3. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi perekonomian wilayah sektor pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan memperhatikan sektor perekonomian Kalimantan Selatan sebagai daerah referensi. Menurut Sjafrizal (2008) Analisis Tipologi Klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*) (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar kontribusi terhadap sektor dibandingkan tersebut PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan **$si > s$ dan $ski > sk$** .
2. Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*) (Kuadran II). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil pertumbuhan dibandingkan laju sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan **$si < s$ dan $ski > sk$** .

3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*) (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si > s$ dan $ski < sk$.
4. Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) (Kuadran IV). Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB (si) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi (s) dan sekaligus memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB (ski) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi (sk). Klasifikasi ini dilambangkan dengan $si < s$ dan $ski < sk$.

Tabel 4.7. memperlihatkan bahwa terdapat 4 kategori yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kategori Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Terdapat 7 kategori yang memiliki rata-rata kontribusi lebih besar dibandingkan kontribusi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Kontruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya.

Berdasarkan tabel 4.9. diketahui bahwa terdapat dua kategori yang memiliki nilai $Si > S$ dan $Ski > Sk$ yaitu kategori Informasi dan Komunikasi dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang berarti bahwa kategori ini merupakan Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Kemudian yang masuk pada sektor Maju tapi tertekan ($Si < S$ dan $Ski > Sk$) adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real Estat, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya. Pada kuadran III dimana Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*) $si > s$ dan $ski < sk$ terdapat kategori Pertambangan dan Penggalan dan Industri

Pengolahan. Pada Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sektor) si < s dan ski < sk yaitu kategori Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Perusahaan. Tabel 4.10 memperlihatkan posisi masing-masing kategori berdasarkan analisis Tipologi Klassen.

**Tabel 4.9
Rata-Rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan 2013-2023**

Lapangan Usaha	Rata-rata LPE Kab HSS (Si)	Rata-rata LPE Kalsel (S)	Rata-rata Kontribusi Kab HSS (Ski)	Rata-Rata Kontribusi Kalsel (Sk)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,13%	2,75%	25,15%	14,04%
Pertambangan dan Penggalian	12,41%	2,17%	12,78%	26,00%
Industri Pengolahan	3,93%	3,50%	7,67%	12,75%
Pengadaan Listrik dan Gas	7,82%	9,35%	0,07%	0,12%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,03%	5,98%	0,36%	0,40%
Konstruksi	4,54%	4,87%	7,79%	7,48%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,75%	6,10%	8,70%	8,80%
Transportasi dan Pergudangan	4,94%	6,63%	5,12%	6,00%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,14%	6,20%	3,67%	1,95%
Informasi dan Komunikasi	7,73%	7,62%	5,00%	3,84%
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,61%	5,16%	1,88%	3,20%
Real Estat	5,23%	5,69%	2,55%	2,30%
Jasa Perusahaan	5,12%	6,24%	0,11%	0,59%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,89%	3,68%	8,21%	5,21%
Jasa Pendidikan	4,21%	5,56%	7,16%	4,34%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,07%	7,09%	2,16%	1,88%
Jasa lainnya	5,54%	5,55%	1,62%	1,10%
PDRB	4,86%	4,04%	100,00%	100,00%

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS HSS data diolah (2024)

Tabel 4.10
Klasifikasi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2024 Analisis Tipologi Klassen

<p style="text-align: center;">Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (developed sektor) Si > S dan Ski > Sk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi dan Komunikasi • Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 	<p style="text-align: center;">Kuadran II Sektor maju tapi tertekan (stagnant sektor) Si < S dan Ski > Sk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan • Konstruksi • Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum • Real Estat • Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib • Jasa Pendidikan • Jasa Lainnya
<p style="text-align: center;">Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat berkembang (developing sektor) si > s dan ski < sk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan dan Penggalian • Industri Pengolahan 	<p style="text-align: center;">Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (underdeveloped sektor) si < s dan ski < sk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Listrik dan Gas • Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang • Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Transportasi dan Pergudangan • Jasa Keuangan dan Asuransi • Jasa Perusahaan

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS HSS data diolah (2024)

4.3.4. PDRB perkapita

PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang lebih baik, dan sebaliknya PDRB per kapita yang rendah mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan

tingkat kesejahteraan masyarakat, dihitung dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010. Tabel 4.11 memperlihatkan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku. Nilai PDRB per kapita Hulu Sungai Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB per kapita tercatat sebesar 17,15 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 24,39 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Pada tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,19 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 36,35 juta rupiah dan tahun 2023 sebesar 38,62 Juta Rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,23 % dibandingkan Tahun 2022. PDRB per kapita sebesar tersebut diartikan sebagai nilai tambah yang diperoleh oleh setiap penduduk sebagai akibat dari adanya kegiatan perekonomian di wilayah tersebut.

Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB per kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan pada sebelas tahun terakhir dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 4,07 persen. Pada tahun 2023, PDRB perkapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas dasar harga konstan mencapai 22,36 juta rupiah, angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 21,70 juta rupiah atau bertumbuh sebesar 3,01 %.

**Tabel 4.11.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2013-2023**

Keterangan	Tahun										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010)	3.334,47	3.527,59	3.740,95	3.968,57	4.211,49	4.470,25	4.706,46	4.650,23	4.844,91	5.039,77	5.305,52
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (2010)	3.801,45	4.258,17	4.782,06	5.198,55	5.655,33	6.158,26	6.555,48	6.564,93	7.125,71	8.442,00	9.165,46
Jumlah Penduduk	221.614	224.474	227.153	229.889	232.587	235.217	237.702	228.006	229.960	232.212	237.319
PDRB Perkapita ADHK	15.046.297	15.714.916	16.468.856	17.262.983	18.107.160	19.004.791	19.799.833	20.395.209	21.068.490	21.703.314	22.356.069
PDRB Perkapita ADHB	17.153.474	18.969.547	21.052.154	22.613.305	24.314.902	26.181.186	27.578.565	28.792.795	30.986.737	36.354.710	38.620.844
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK	4,39%	4,44%	4,80%	4,82%	4,89%	4,96%	4,18%	3,01%	3,30%	3,01%	3,01%
Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB	10,31%	10,59%	10,98%	7,42%	7,52%	7,68%	5,34%	4,40%	7,62%	17,32%	6,23%

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan data diolah (2024)

4.4. Tinjauan Perekonomian Per Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Perekonomian di setiap Kabupaten/Kota terbentuk dari berbagai macam aktivitas/kegiatan ekonomi yang timbul di daerah/region (kecamatan) tersebut. yang sering disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan disajikannya data PDRB Per Kecamatan secara berkala dapat dilihat posisi dan kondisi perekonomian suatu daerah (kecamatan) dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan itu penyajian analisis ini merupakan analisis gambaran perekonomian pada keadaan terakhir yaitu Tahun 2023 dan perkembangannya selama periode Tahun 2013 sampai dengan 2023 .

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai macam aktivitas ekonomi pada suatu kecamatan. Data PDRB Kecamatan merupakan gambaran kemampuan kecamatan untuk mengelola Sumber daya alam yang dimiliki untuk menjadi suatu proses produksi. Adanya perbedaan nilai PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing kecamatan sangat dipengaruhi oleh potensi Sumber daya ekonomi yang berupa Sumber daya tenaga kerja (*labor*) dan Sumber daya modal atau *capital* (*capital*) yang ada di kecamatan tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan data yang belum lengkap tersedia di Kecamatan tersebut menyebabkan nilai PDRB beberapa sektor menggunakan alokator yang tersedia di tingkat Kabupaten.

Nilai PDRB Kecamatan tahun 2013 sampai dengan 2023 pada Penelitian ini didapatkan dengan cara mendistribusikan nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sampai dengan 2023 yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Besaran PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 sampai dengan 2023 menurut klasifikasi lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam satuan Milyar Rupiah telah di sajikan pada pada Tabel 4.12 dan 4.13 yang selanjutnya akan menjadi dasar pengalokasian ke masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 4.12
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 - 2023 Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1045,83	1150,52	1294,56	1401,37	1449,49	1547,52	1610,21	1629,44	1660,82	1729,51	1877,15
Pertambangan dan Penggalian	357,66	394,74	402,04	451,99	559,93	664,40	679,52	637,93	904,34	1727,85	1882,12
Industri Pengolahan	306,13	338,80	383,99	426,75	474,45	499,53	525,29	516,22	567,83	623,32	664,96
Pengadaan Listrik dan Gas	1,44	1,91	2,94	3,72	4,37	4,95	5,29	5,68	6,02	6,53	7,06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,28	15,50	17,63	18,24	19,36	21,11	22,72	24,74	26,24	27,90	28,73
Konstruksi	295,95	338,26	388,17	415,32	447,64	487,54	528,07	513,36	561,29	622,01	674,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	351,50	396,27	441,15	474,47	520,95	570,03	616,85	612,83	660,79	774,69	871,68
Transportasi dan Pergudangan	199,36	223,57	248,10	266,74	293,36	317,53	342,72	338,80	357,48	398,32	467,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131,06	152,05	172,22	185,95	203,87	225,07	250,45	251,24	265,65	304,12	328,04
Informasi dan Komunikasi	159,85	182,61	202,86	222,27	246,35	268,65	297,25	322,43	350,18	379,88	406,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	78,34	90,65	96,69	105,83	114,31	122,93	129,81	130,63	139,70	148,09	166,02
Real Estat	95,61	107,13	119,69	126,92	135,76	145,59	158,10	169,78	179,18	191,91	201,44
Jasa Perusahaan	4,33	5,09	5,69	6,33	6,99	7,58	8,21	8,31	8,64	9,54	10,75
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	362,86	406,25	481,12	504,51	530,46	571,52	612,10	609,01	606,57	619,26	657,88
Jasa Pendidikan	268,76	305,10	349,64	392,33	428,80	462,70	501,23	507,88	521,78	533,12	541,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	71,64	82,49	97,00	108,30	120,84	133,24	147,20	165,07	181,58	203,94	223,75
Jasa lainnya	57,85	67,23	78,56	87,49	98,41	108,37	120,46	121,58	127,62	142,01	156,07
PDRB dengan Pertambangan	3801,45	4258,17	4782,06	5198,55	5655,33	6158,26	6555,48	6564,93	7125,71	8442,00	9165,46
PDRB non Pertambangan	3443,79	3863,43	4380,02	4746,56	5095,40	5493,86	5875,96	5927,00	6221,37	6714,15	7283,34

Sumber : BPS Kabupaten hulu Sungai Selatan data diolah 2024

Tabel 4.13
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 - 2023 Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	924,48	964,90	1003,82	1052,30	1069,85	1116,15	1145,44	1147,63	1147,56	1141,63	1193,47
Pertambangan dan Penggalian	321,20	350,39	388,85	449,77	536,34	619,13	666,83	625,47	709,00	756,02	822,43
Industri Pengolahan	269,75	279,21	291,61	307,30	325,29	340,15	354,98	342,33	362,64	381,69	402,07
Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	2,05	2,51	2,65	2,73	2,92	3,05	3,18	3,33	3,57	3,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,75	12,73	13,60	13,99	14,41	15,20	16,24	17,57	18,43	19,30	19,75
Konstruksi	269,39	283,10	297,76	311,11	326,95	341,07	361,31	348,72	370,15	390,75	416,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	297,74	315,17	330,16	345,35	363,60	382,41	401,89	392,04	413,20	446,84	465,34
Transportasi dan Pergudangan	173,32	182,91	192,98	202,50	215,57	227,27	239,94	233,68	244,33	258,33	274,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	116,47	124,26	132,61	141,62	151,84	161,70	174,73	170,78	177,75	198,90	211,36
Informasi dan Komunikasi	145,62	157,90	171,78	185,18	200,13	213,03	230,68	251,26	270,75	288,74	306,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	66,52	70,93	73,93	77,88	80,03	82,15	85,29	86,26	87,64	86,55	95,35
Real Estat	85,48	90,13	95,34	99,38	105,09	109,61	115,95	122,47	126,94	133,25	137,71
Jasa Perusahaan	3,61	3,86	4,12	4,45	4,75	4,95	5,19	5,11	5,22	5,56	5,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	293,94	310,78	337,62	344,43	353,17	366,47	386,58	375,83	369,38	369,88	378,02
Jasa Pendidikan	238,58	256,18	273,58	290,19	308,47	323,92	341,19	341,76	342,55	346,05	348,10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,83	68,06	72,40	77,99	85,45	91,54	99,43	109,23	116,59	127,74	136,64
Jasa lainnya	51,10	55,03	58,31	62,48	67,85	72,58	77,74	76,91	79,45	84,97	88,90
PDRB Dengan Pertambangan	3334,47	3527,59	3740,95	3968,57	4211,49	4470,25	4706,46	4650,23	4844,91	5039,77	5305,52
PDRB Non Pertambangan	3013,27	3177,20	3352,10	3518,80	3675,15	3851,12	4039,63	4024,76	4135,91	4283,75	4483,09

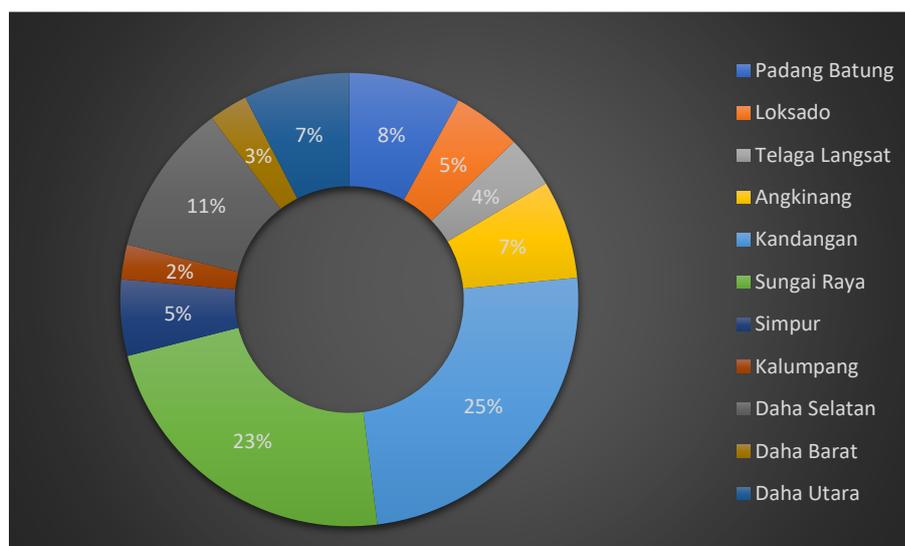
Sumber : BPS Kabupaten hulu Sungai Selatan data diolah 2024

Menurut Fajar (2014) ada Ada dua pendekatan untuk mengestimasi PDRB level kecamatan, yaitu: Pendekatan Konsumsi Rumah Tangga dan Pendekatan Penduduk usia bekerja. Setelah melakukan perhitungan atas dasar kedua pendekatan itu kemudian dirata-ratakan dan menghasilkan PDRB Kecamatan sekabupaten Hulu Sungai Selatan Periode 2013 – 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

NO	KECAMATAN	PDRB KECAMATAN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padang Batung	315,75	354,28	401,62	435,10	466,87	503,08	511,87	528,39	556,98	594,69	693,09
2	Loksado	166,70	180,38	230,88	256,82	288,91	321,00	340,82	335,86	355,72	387,40	419,90
3	Telaga Langsat	145,35	163,24	185,31	201,13	216,30	233,66	258,70	252,95	276,06	269,02	277,33
4	Angkinang	270,18	302,61	342,52	370,64	397,33	427,85	512,45	490,04	529,48	537,32	580,21
5	Kandangan	854,29	985,71	1116,86	1227,96	1376,24	1542,18	1722,09	1720,80	1817,00	2083,15	2197,65
6	Sungai Raya	639,73	771,60	903,47	1030,34	1167,21	1310,08	1335,91	1361,44	1643,27	2548,37	2827,82
7	Simpur	222,19	248,24	280,31	302,58	323,62	347,61	362,95	381,97	367,52	410,03	434,85
8	Kalumpang	96,78	108,07	121,97	131,59	140,61	160,95	187,98	170,03	186,98	177,18	192,58
9	Daha Selatan	600,81	611,82	627,96	640,68	654,26	660,83	665,97	673,48	700,62	719,24	796,94
10	Daha Barat	100,83	122,61	150,77	163,84	170,35	180,61	182,36	176,01	197,71	199,73	209,92
11	Daha Utara	388,83	409,61	420,39	437,84	453,62	470,40	474,39	473,94	494,37	515,88	535,17
	JUMLAH	3801,45	4258,17	4782,06	5198,55	5655,33	6158,26	6555,47	6564,93	7125,71	8442,00	9165,46

Gambar 4.7.
Rata-rata Kontribusi Masing-masing Kecamatan terhadap PDRB Kab. Hulu
Sungai Selatan Periode 2013 – 2023

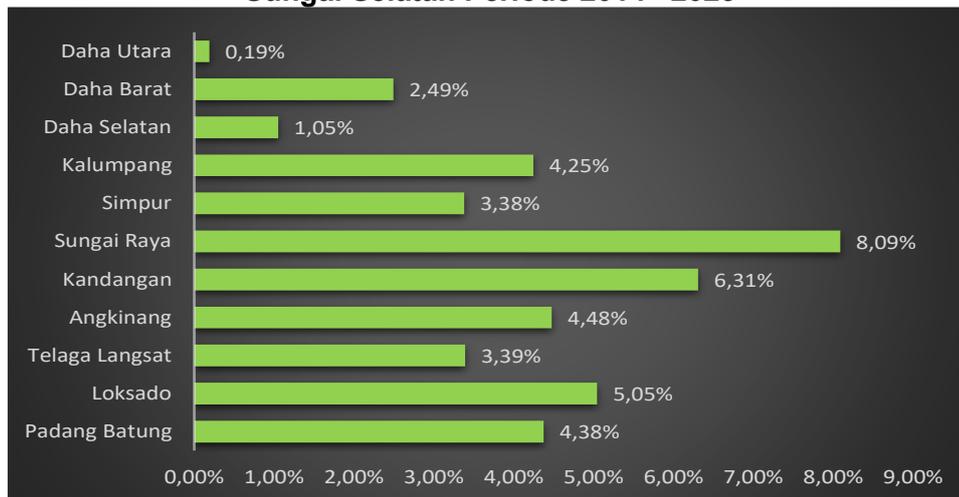


Berdasarkan tabel 4.14 dan gambar 4.7 diketahui bahwa rata-rata kontribusi PDRB selama periode 2013 – 2023 tertinggi berasal dari kecamatan Kandangan sebesar 25 % diikuti oleh Kecamatan Sungai Raya sebesar 23 % dan Kecamatan Daha Selatan sebesar 11 %. Untuk mengetahui secara rinci kontribusi masing-masing kategori untuk setiap kecamatan peneliti menggunakan periode 2019 sampai dengan 2023 disebabkan karena keterbatasan data. Berikut ini adalah PDRB berdasarkan harga berlaku dan harga konstan untuk masing masing kecamatan.

Tabel 4.15
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2013 – 2023 Atas Dasar Harga Konstan

NO	KECAMATAN	PDRB KECAMATAN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padang Batung	276,28	291,36	307,37	322,56	336,74	352,65	360,73	365,61	365,61	386,65	423,11
2	Loksado	166,99	173,67	189,35	197,03	213,21	226,79	246,04	240,34	240,34	258,04	271,93
3	Telaga Langsat	127,18	134,24	141,82	149,11	156,01	163,79	181,49	175,77	175,77	176,11	175,62
4	Angkinang	236,41	248,86	262,14	274,77	286,58	299,92	356,77	336,84	336,84	345,14	360,30
5	Kandangan	724,55	748,84	792,75	897,64	905,79	1072,32	1145,59	1127,25	1127,25	1288,67	1316,48
6	Sungai Raya	653,13	754,52	845,97	900,22	965,64	1020,60	1114,21	1115,97	1115,97	1283,27	1412,61
7	Simpur	194,41	204,15	214,52	224,32	233,41	243,67	250,54	260,21	260,21	262,51	269,68
8	Kalumpang	84,68	88,88	93,34	97,55	101,42	125,81	134,42	121,16	121,16	118,43	123,96
9	Daha Selatan	440,02	445,03	448,04	452,38	456,39	457,40	459,34	459,31	459,31	458,34	487,62
10	Daha Barat	103,10	109,05	115,39	121,46	127,20	133,62	126,22	120,54	120,54	128,29	130,36
11	Daha Utara	327,72	328,99	330,26	331,53	332,79	334,06	331,10	327,24	327,24	334,31	333,86
	JUMLAH	3334,47	3527,59	3740,95	3968,57	4211,49	4494,1	4706,46	4650,23	4844,91	5039,77	5305,52

Gambar 4.8.
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Masing-masing Kecamatan Kab. Hulu
Sungai Selatan Periode 2014– 2023



Kecamatan Padang Batu

Kecamatan Padang Batu berada di daerah dataran tinggi dengan pemandangan yang indah, terdiri dari pegunungan dan lembah. Hal ini memberikan potensi alam yang baik untuk pertanian dan pariwisata. Secara geografis Kecamatan Padang Batung di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kandangan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin disebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Loksado; dan disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya. Kecamatan Padang Batung memiliki luas wilayah 203,93 km². Kecamatan Padang Batu terdiri dari 17 desa. Berdasarkan data berikut adalah PDRB Kecamatan Padang Batu :

Tabel 4.16
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Padang Batu Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	191,82	194,11	197,85	206,03	223,62	202,68
Pertambangan dan Penggalian	11,72	4,82	4,50	6,76	62,53	18,07
Industri Pengolahan	24,01	23,78	25,95	32,06	35,04	28,17
Pengadaan Listrik dan Gas	0,49	0,53	0,52	0,63	0,68	0,57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,93	2,02	2,16	2,35	2,33	2,16
Konstruksi	28,86	25,71	58,74	48,81	49,39	42,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,01	19,89	21,45	25,12	28,28	22,95
Transportasi dan Pergudangan	51,41	60,98	64,35	71,70	84,14	66,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,35	3,45	1,06	12,54	9,11	5,90
Informasi dan Komunikasi	33,71	36,19	38,52	41,79	46,48	39,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,09	11,75	7,45	9,87	9,83	10,00
Real Estat	24,47	26,28	27,73	29,72	31,20	27,88
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	46,88	58,27	45,17	43,43	45,23	47,80
Jasa Pendidikan	41,47	41,17	41,80	42,45	41,88	41,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,61	8,03	7,72	8,04	8,57	8,39
Jasa lainnya	11,03	11,42	12,02	13,40	14,78	12,53
PDRB	511,87	528,39	556,98	594,69	693,09	577,01

Tabel 4.17
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Padang Batu Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136,45	136,71	136,70	136,00	142,17
Pertambangan dan Penggalian	11,50	4,73	3,53	2,96	27,32
Industri Pengolahan	16,23	15,77	16,58	20,12	21,19
Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,29	0,29	0,34	0,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,38	1,44	1,52	1,62	1,60
Konstruksi	19,75	17,46	38,74	30,66	30,50
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,97	13,68	14,71	15,53	16,21
Transportasi dan Pergudangan	35,99	42,06	43,98	46,50	49,36
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,35	0,71	8,20	5,87
Informasi dan Komunikasi	26,16	28,20	29,78	31,76	34,99
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,29	7,76	4,67	5,77	5,65
Real Estat	17,94	18,95	19,65	20,64	21,33
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	29,61	35,96	27,51	25,94	25,99
Jasa Pendidikan	28,23	27,70	27,44	27,55	26,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,49	5,31	4,95	5,04	5,23
Jasa lainnya	7,12	7,23	7,48	8,02	8,42
PDRB	360,73	365,61	378,24	386,65	423,11

Berdasarkan Tabel 4.16, 4.17 dan 4.18 diketahui bahwa Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Padang Batu dengan rata-rata sebesar 35,13 persen diikuti oleh Kategori Transportasi dan Pergudangan dengan rata-rata 11,53 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kecamatan Padang batu sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk produksi pertanian Kecamatan Padang Batu menghasilkan beberapa komoditas. Untuk Biofarmaka Kecamatan Padang Batu menghasilkan Jahe, Kencur, kunyit dan Serai. Untuk Produksi Perkebunan Menghasilkan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa sebagai Produk unggulan. Selain itu Penduduk Kecamatan Padang Batu juga memelihara ternak seperti Sapi, Ayam dan Itik. Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023 di Kecamatan Padang Batu Rumah Tangga yang bekerja sebagai Petani sebesar 11,91 % dari total Rumah Tangga Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 4.18
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Padang Batu Tahun 2019 - 2023**

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,47%	36,74%	35,52%	34,64%	32,26%	35,13%
Pertambangan dan Penggalian	2,29%	0,91%	0,81%	1,14%	9,02%	3,13%
Industri Pengolahan	4,69%	4,50%	4,66%	5,39%	5,06%	4,88%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10%	0,10%	0,09%	0,11%	0,10%	0,10%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,38%	0,38%	0,39%	0,39%	0,34%	0,37%
Konstruksi	5,64%	4,87%	10,55%	8,21%	7,13%	7,33%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91%	3,76%	3,85%	4,22%	4,08%	3,98%
Transportasi dan Pergudangan	10,04%	11,54%	11,55%	12,06%	12,14%	11,53%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,66%	0,65%	0,19%	2,11%	1,31%	1,02%
Informasi dan Komunikasi	6,59%	6,85%	6,92%	7,03%	6,71%	6,82%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17%	2,22%	1,34%	1,66%	1,42%	1,73%
Real Estat	4,78%	4,97%	4,98%	5,00%	4,50%	4,83%
Jasa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,16%	11,03%	8,11%	7,30%	6,53%	8,28%
Jasa Pendidikan	8,10%	7,79%	7,50%	7,14%	6,04%	7,24%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,88%	1,52%	1,39%	1,35%	1,24%	1,45%
Jasa lainnya	2,16%	2,16%	2,16%	2,25%	2,13%	2,17%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Untuk kategori Transportasi dan Pergudangan Kecamatan Padang Batu juga memiliki nilai PDRB yang cukup tinggi mengingat mulai meningkatnya

kegiatan Pertambangan dan Penggalian di daerah tersebut. Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib merupakan kontribusi ketiga terbesar di Kecamatan Padang Batu dengan Rata-rata sebesar 8,28 % tetapi kecenderungannya mengalami penurunan mengingat jumlah PNS yang berada di kecamatan Padang batu mengalami penurunan. Kategori yang akan mengalami peningkatan adalah kategori Pertambangan dan Penggalian. Berdasarkan data dari dinas tenaga kerja diketahui pada tahun 2023 terdapat perusahaan yang sudah mulai menjalankan usaha pertambangan di wilayah ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan di kategori Pertambangan dan Penggalian akan meningkatkan PDRB Kecamatan Padang Batu di masa yang akan datang.

Kecamatan Loksado

Kecamatan Loksado adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Loksado berada di wilayah pegunungan, dengan lanskap yang indah dan berbagai potensi alam yang menarik. Kecamatan ini merupakan bagian dari kawasan pedalaman yang kaya akan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Luas Wilayah Kecamatan Loksado adalah 338,89 km² atau 18,78% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah 11 desa. Pusat pemerintah Kecamatan Loksado berjarak 40 Km dari ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan batas batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Telaga Langsat dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Tapin, sebelah Timur berbatasan Kabupaten Kota Baru, sebelah barat berbatasan Kecamatan Padang Batung.

Pada umumnya wilayah kecamatan Loksado sebagian besar adalah daerah dataran tinggi dan pegunungan mulai dari 100 M s.d lebih dari 1000 M dari permukaan laut. Kecamatan Loksado juga dilewati oleh sungai Amandit dan anak sungai lainnya, dengan curah hujan tertinggi di bulan Desember sebesar 276 mm. Sungai Loksado dijadikan sebagai obyek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan di Indonesia dan negara di dunia, melalui obyek wisata Bambu Rafting dapat melihat keindahan sungai amandit, dan pepohonan yang begitu hijau.

Tabel 4.19
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Loksado Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111,99	113,32	115,51	120,28	130,55
Pertambangan dan Penggalian	8,80	3,62	3,38	5,07	4,92
Industri Pengolahan	24,28	23,16	27,01	25,99	27,40
Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,21	0,22	0,24	0,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
Konstruksi	20,33	32,32	28,56	36,08	24,64
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	41,56	41,31	44,49	52,27	58,75
Transportasi dan Pergudangan	17,14	11,86	14,30	15,93	18,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,68	28,05	36,13	42,11	52,15
Informasi dan Komunikasi	24,52	26,32	28,01	30,39	42,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,22	5,53	5,59	6,91	6,55
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,18	21,53	22,51	21,79	22,36
Jasa Pendidikan	18,87	18,56	19,94	19,59	19,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,33	5,56	5,35	5,51	5,78
Jasa lainnya	4,73	4,51	4,71	5,23	5,83
PDRB	340,82	335,86	355,72	387,40	419,90

Tabel 4.20
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Loksado Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	79,66	79,81	79,81	79,40	83,00
Pertambangan dan Penggalian	8,63	3,55	2,65	2,22	2,15
Industri Pengolahan	16,41	15,36	17,25	15,73	16,56
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,12	0,13	0,14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi	13,91	21,95	18,84	22,66	15,22
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	34,53	35,83	37,31	40,58	42,28
Transportasi dan Pergudangan	12,00	8,18	9,77	10,33	10,97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22,80	19,06	24,17	27,54	33,60
Informasi dan Komunikasi	19,03	20,51	21,66	23,10	32,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,43	3,65	3,51	4,04	3,76
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	14,01	13,29	13,71	13,01	12,85
Jasa Pendidikan	12,84	12,49	13,09	12,72	12,47
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,63	3,68	3,44	3,45	3,53
Jasa lainnya	3,05	2,85	2,94	3,13	3,32
PDRB	246,04	240,34	248,26	258,04	271,93

Tabel 4.20
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Loksado Tahun 2019 - 2023

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					Rata-Rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,86%	33,74%	32,47%	31,05%	31,09%	32,24%
Pertambangan dan Penggalian	2,58%	1,08%	0,95%	1,31%	1,17%	1,42%
Industri Pengolahan	7,12%	6,90%	7,59%	6,71%	6,52%	6,97%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Konstruksi	5,96%	9,62%	8,03%	9,31%	5,87%	7,76%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,19%	12,30%	12,51%	13,49%	13,99%	12,90%
Transportasi dan Pergudangan	5,03%	3,53%	4,02%	4,11%	4,45%	4,23%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,59%	8,35%	10,16%	10,87%	12,42%	10,28%
Informasi dan Komunikasi	7,19%	7,84%	7,88%	7,84%	10,15%	8,18%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,53%	1,65%	1,57%	1,78%	1,56%	1,62%
Real Estat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jasa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,51%	6,41%	6,33%	5,62%	5,33%	6,04%
Jasa Pendidikan	5,54%	5,53%	5,61%	5,06%	4,62%	5,27%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,44%	1,66%	1,51%	1,42%	1,38%	1,68%
Jasa lainnya	1,39%	1,34%	1,33%	1,35%	1,39%	1,36%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan Tabel 4.19 , 4.20 dan 4.21 diketahui bahwa Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Loksado dengan rata-rata sebesar 32,24 persen diikuti oleh Kategori Perdagangan Besar dan Eceran reparasi sepeda motor dengan rata-rata 12,90 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kecamatan Loksado sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk produksi pertanian Kecamatan Loksado menghasilkan beberapa komoditas. Untuk Buah-buahan kecamatan Loksado menghasilkan pisang, Biofarmaka Kecamatan Padang Batu menghasilkan Jahe, Kencur dan kunyit. Untuk Produksi Perkebunan Menghasilkan Kelapa Sawit, Karet dan Kayu Manis serta Kemiri sebagai Produk unggulan. Selain itu Penduduk Kecamatan Loksado juga memelihara ternak seperti Babi dan itik . Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023 di Kecamatan Padang Batu Rumah Tangga yang bekerja sebagai Petani sebesar 6,95 % dari total Rumah Tangga Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya Kontribusi ketiga terbesar di kecamatan loksado adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

yaitu rata-rata sebesar 10,28 %. Hal ini di dukung dengan adanya sungai Loksado dijadikan sebagai obyek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan di Indonesia dan negara di dunia, melalui obyek wisata Bambu Rafting dapat melihat keindahan sungai amandit, dan pepohonan yang begitu hijau. Hampir sebagian besar Penginapan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di Kecamatan Loksado.

Kecamatan Telaga Langsung

Kecamatan Telaga Langsung secara keseluruhan meliputi wilayah seluas 58,40 Km². Adapun Kecamatan Telaga Langsung ini terletak 13 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan Telaga Langsung merupakan Kecamatan yang berbatasan: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pandang Batung. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Loksado. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkinang. Wilayah Kecamatan Telaga Langsung secara administrasi telah terbagi dalam 11 desa. Berikut ini adalah PDRB Kecamatan Telaga Langsung Atas Dasar harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel 4.21
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Telaga Langsung Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107,59	108,88	110,97	115,56	125,43
Pertambangan dan Penggalian					
Industri Pengolahan	12,30	12,15	13,70	14,17	15,64
Pengadaan Listrik dan Gas	0,24	0,26	0,26	0,27	0,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,74	0,93	1,05	1,03	1,07
Konstruksi	31,00	27,36	35,26	24,12	4,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,65	19,53	21,08	24,55	27,79
Transportasi dan Pergudangan	8,57	8,47	8,94	7,97	9,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Informasi dan Komunikasi	9,19	9,87	10,51	11,40	15,49
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,18	7,60	8,38	7,90	10,92
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26,93	25,26	29,32	22,83	24,53
Jasa Pendidikan	23,34	22,87	26,44	28,33	29,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,98	4,32	4,41	4,47	5,22
Jasa lainnya	5,14	5,44	5,74	6,43	6,97
PDRB	258,70	252,95	276,06	269,02	277,33

Tabel 4.22
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Telaga Langsung Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	76,54	76,68	76,68	76,28	79,75
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	8,31	8,06	8,75	8,93	9,46
Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,15	0,14	0,15	0,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,53	0,66	0,74	0,71	0,74
Konstruksi	21,21	18,59	23,25	15,15	2,97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,07	15,80	16,94	17,77	18,72
Transportasi dan Pergudangan	6,00	5,84	6,11	5,17	5,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Informasi dan Komunikasi	7,13	7,69	8,12	8,66	11,66
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,71	5,02	5,26	4,62	6,27
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,01	15,59	17,86	13,63	14,10
Jasa Pendidikan	15,89	15,39	17,36	18,39	19,16
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,04	2,86	2,83	2,80	3,19
Jasa lainnya	3,32	3,44	3,57	3,85	3,97
PDRB	181,49	175,77	187,61	176,11	175,62

Berdasarkan Tabel 4.21, 4.22 dan 4.23 diketahui bahwa Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Telaga Langsung dengan rata-rata sebesar 42,60 persen diikuti oleh Kategori Jasa Pendidikan sebesar 9,78 persen dan Jasa Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib dengan rata-rata 9,67persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kecamatan Telaga Langsung sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk produksi pertanian Kecamatan Telaga Langsung menghasilkan beberapa komoditas. Untuk Biofarmaka Kecamatan Telaga Langsung menghasilkan Mahkota dewa, Jahe, Kencur kunyit dan Mengkudu . Untuk Produksi Perkebunan Menghasilkan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa sebagai Produk unggulan. Selain itu Penduduk Kecamatan Telaga langsung juga memelihara ternak seperti Sapi, kambing, Ayam dan Itik. Berdasarkan hasil

sensus pertanian tahun 2023 di Kecamatan Telaga Langsung Rumah Tangga yang bekerja sebagai Petani sebesar 6,68 % dari total Rumah Tangga Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 4.23
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Telaga Langsung Tahun 2019 - 2023

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,59%	43,04%	40,20%	42,96%	45,23%	42,60%
Pertambangan dan Penggalian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Industri Pengolahan	4,75%	4,80%	4,96%	5,27%	5,64%	5,09%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09%	0,10%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,29%	0,37%	0,38%	0,38%	0,39%	0,36%
Konstruksi	11,98%	10,82%	12,77%	8,97%	1,73%	9,25%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,60%	7,72%	7,64%	9,12%	10,02%	8,42%
Transportasi dan Pergudangan	3,31%	3,35%	3,24%	2,96%	3,37%	3,25%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%
Informasi dan Komunikasi	3,55%	3,90%	3,81%	4,24%	5,59%	4,22%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77%	3,01%	3,04%	2,94%	3,94%	3,14%
Real Estat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jasa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,41%	9,99%	10,62%	8,48%	8,85%	9,67%
Jasa Pendidikan	9,02%	9,04%	9,58%	10,53%	10,75%	9,78%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,31%	1,71%	1,60%	1,66%	1,88%	1,83%
Jasa lainnya	1,99%	2,15%	2,08%	2,39%	2,51%	2,22%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kecamatan Angkinang

Secara geografis Kecamatan Angkinang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah utara; Kecamatan Telaga Langsung disebelah timur; Kecamatan Padang Batung disebelah selatan; dan Kecamatan Kandangan disebelah barat. Kecamatan Angkinang memiliki luas wilayah 58,40 km². Kecamatan Angkinang terdiri dari 11 desa. Berdasarkan data berikut adalah PDRB Kecamatan Angkinang :

Tabel 4.24
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Angkinang Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196,92	199,27	203,11	211,51	229,56
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	65,77	64,04	70,78	72,38	76,59
Pengadaan Listrik dan Gas	0,44	0,47	0,46	0,57	0,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,17	1,20	1,18	1,26	1,21
Konstruksi	41,06	26,72	46,11	22,78	24,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	64,73	64,31	69,38	81,68	91,48
Transportasi dan Pergudangan	8,57	8,47	8,94	7,97	9,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,06	4,31	5,31	15,05	15,49
Informasi dan Komunikasi	18,39	16,45	17,51	18,99	19,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,78	10,37	10,24	8,89	12,01
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	38,65	38,32	38,50	36,76	38,89
Jasa Pendidikan	39,03	38,78	40,29	40,54	40,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,55	7,41	7,24	7,30	8,20
Jasa lainnya	9,35	9,90	10,42	11,63	12,78
PDRB	512,45	490,04	529,48	537,32	580,21

Tabel 4.25
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Angkinang Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	140,08	140,35	140,34	139,61	145,95
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00			
Industri Pengolahan	44,45	42,47	45,20	43,97	46,31
Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,27	0,25	0,31	0,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	0,85	0,83	0,87	0,83
Konstruksi	28,09	18,15	30,41	14,31	15,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	46,56	45,40	48,02	51,61	54,35
Transportasi dan Pergudangan	6,00	5,84	6,11	5,17	5,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,02	2,93	3,56	9,84	9,98
Informasi dan Komunikasi	14,27	12,82	13,54	14,44	14,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,43	6,85	6,43	5,19	6,90
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,41	23,65	23,45	21,96	22,34
Jasa Pendidikan	26,57	26,10	26,45	26,31	25,94
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,77	4,90	4,65	4,57	5,01
Jasa lainnya	6,03	6,26	6,49	6,96	7,28
PDRB	356,77	336,84	355,71	345,14	360,30

Berdasarkan Tabel 4.24, 4.25 dan 4.26. Diketahui bahwa Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Angkinang dengan rata-rata sebesar 39,28 persen diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan dengan rata-rata 13,19 persen dan Perdagangan Besar dan Eceran rata-rata sebesar 13,97 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kecamatan Angkinang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan di Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Untuk produksi pertanian Kecamatan Angkinang menghasilkan beberapa komoditas. Ada Komoditas Perikanan yang nilai produksinya rata-rata sebesar 6 persen dari produksi Kabupaten HSS. Kecamatan Angkinang merupakan penghasil Pisang, Jeruk Siam, rambutan, Duku dan Mangga. Biofarmaka Kecamatan Padang Batu menghasilkan Jahe, Kencur, Laos dan kunyit. Untuk Produksi Perkebunan Menghasilkan Kelapa Sawit, Karet dan Kelapa sebagai Produk unggulan. Selain itu Penduduk Kecamatan Angkinang juga memelihara ternak seperti Itik, Kambing dan sapi. Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023 di Kecamatan Angkinang Rumah Tangga yang bekerja sebagai Petani sebesar 12,23 % dari total Rumah Tangga Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selain itu Kategori Industri Pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap PDRB Kecamatan Angkinang. Kecamatan Angkinang merupakan salah satu daerah yang dijadikan sebagai kawasan industri pengolahan terutama industri kerupuk. Untuk perdagangan besar dan eceran, memberikan kontribusi terbesar Kedua sebesar 13,97 persen. Berdasarkan data sarana dan prasara perdagangan di Kecamatan Angkinang cukup banyak. Pada Tahun 2023 jumlah Pasar yang berada di Angkinang sebanyak 8 pasar dengan jumlah toko sebanyak 100 buah serta 830 lapak. Hal ini mendukung banyaknya kontribusi dari kategori perdagangan besar dan eceran di Kecamatan Angkinang.

Tabel 4.26
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Angkinag Tahun 2019 - 2023

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,43%	40,66%	38,36%	39,36%	39,57%	39,28%
Pertambangan dan Penggalian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Industri Pengolahan	12,84%	13,07%	13,37%	13,47%	13,20%	13,19%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09%	0,10%	0,09%	0,11%	0,11%	0,10%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23%	0,25%	0,22%	0,23%	0,21%	0,23%
Konstruksi	8,01%	5,45%	8,71%	4,24%	4,19%	6,12%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,63%	13,12%	13,10%	15,20%	15,77%	13,97%
Transportasi dan Pergudangan	1,67%	1,73%	1,69%	1,48%	1,61%	1,64%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,96%	0,88%	1,00%	2,80%	2,67%	1,86%
Informasi dan Komunikasi	3,59%	3,36%	3,31%	3,53%	3,34%	3,42%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,91%	2,12%	1,93%	1,65%	2,07%	1,94%
Real Estat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jasa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,54%	7,82%	7,27%	6,84%	6,70%	7,24%
Jasa Pendidikan	7,62%	7,91%	7,61%	7,54%	6,96%	7,53%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67%	1,51%	1,37%	1,36%	1,41%	1,46%
Jasa lainnya	1,82%	2,02%	1,97%	2,17%	2,20%	2,04%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kecamatan Kandangan

Kecamatan Kandangan yang terletak di ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjarak 135 Km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Kandangan merupakan daerah yang sangat strategis dan merupakan kota yang menjadi tulang punggung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan perbatasan sebagai berikut : a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Angkinang b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Padang Batung d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Simpur dan Kalumpang Luas Wilayahnya adalah 106,71 Km² . Kecamatan Kandangan memiliki 18 Desa. Tabel berikut ini adalah PDRB Kecamatan Kandangan Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel 4.27
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Kandangan Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	234,51	237,31	241,88	251,88	273,38
Pertambangan dan Penggalian					
Industri Pengolahan	154,07	150,33	164,15	176,10	187,71
Pengadaan Listrik dan Gas	1,33	1,45	1,47	1,75	1,84
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,18	12,76	13,47	14,48	14,62
Konstruksi	170,07	158,36	162,35	278,50	346,06
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	192,24	190,90	205,80	241,87	271,51
Transportasi dan Pergudangan	111,38	94,86	103,67	111,53	126,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	148,18	155,91	164,70	188,02	189,32
Informasi dan Komunikasi	98,06	108,57	119,06	129,16	131,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	45,66	48,38	54,95	57,26	63,35
Real Estat	78,24	84,02	88,68	100,81	105,81
Jasa Perusahaan	6,16	6,23	6,48	7,16	8,06
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	297,19	286,92	301,51	322,23	258,01
Jasa Pendidikan	133,72	137,42	141,52	149,15	153,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,82	21,31	20,00	22,94	33,72
Jasa lainnya	26,27	26,06	27,31	30,34	33,13
PDRB	1722,09	1720,80	1817,00	2083,15	2197,65

Tabel 4.28
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Kandangan Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	166,82	167,14	167,13	166,26	173,81
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00			
Industri Pengolahan	104,12	99,69	104,83	107,75	113,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,77	0,81	0,81	0,96	1,00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,71	9,06	9,46	10,02	10,05
Konstruksi	116,36	107,57	107,07	174,95	213,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	95,75	90,44	95,33	105,83	109,88
Transportasi dan Pergudangan	77,98	65,43	70,86	72,33	74,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,38	105,98	110,21	122,97	121,98
Informasi dan Komunikasi	76,10	84,61	92,06	98,17	99,13
Jasa Keuangan dan Asuransi	30,00	31,95	34,47	33,47	36,38
Real Estat	57,38	60,61	62,82	70,00	72,34
Jasa Perusahaan	3,89	3,83	3,92	4,17	4,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	187,69	177,06	183,61	192,47	148,25
Jasa Pendidikan	91,02	92,47	92,91	96,81	98,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,66	14,10	12,84	14,37	20,59
Jasa lainnya	16,96	16,48	17,00	18,15	18,87
PDRB	1145,59	1127,25	1165,31	1288,67	1316,48

Berdasarkan Tabel 4.27, 4.28 dan 4.29 Diketahui bahwa Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Loksado dengan rata-rata sebesar 35,13 persen diikuti oleh Kategori Transportasi dan Pergudangan dengan rata-rata 15,55 persen. Hal ini disebabkan karena kecamatan Kandangan merupakan ibukota kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga hampir sebagian besar kegiatan pemerintahan berada di kecamatan Kandangan. Kontribusi terbesar kedua adalah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,05 persen. Untuk produksi pertanian Kecamatan Kandangan menghasilkan beberapa komoditas. Untuk Produksi Perkebunan Menghasilkan Kelapa Sawit, dan Kelapa sebagai Produk unggulan. Selain itu Penduduk Kecamatan Kandangan juga memelihara ternak seperti Sapi, Kambing, Ayam dan Itik. Pada Komoditas Perikanan kecamatan Kandangan memberi kontribusi sebesar 12,5 % dari total sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023 di Kecamatan Kandangan Rumah Tangga yang bekerja sebagai Petani sebesar 14,56 % dari total Rumah Tangga Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk perdagangan besar dan eceran, memberikan kontribusi terbesar Kedua sebesar 11,51 persen. Berdasarkan data sarana dan prasarana perdagangan di Kecamatan Kandangan cukup banyak. Pada Tahun 2023 jumlah Pasar yang berada di Kandangan sebanyak 7 pasar dengan jumlah toko sebanyak 1400, 277 buah BAK, 54 warung dan 1219 lapak. Hal ini mendukung banyaknya kontribusi dari kategori perdagangan besar dan eceran di Kecamatan Kandangan.

Kecamatan Sungai Raya

Secara geografis, Kecamatan Sungai Raya berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Simpur dan Kecamatan Kandangan di sebelah utara; Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Kandangan di sebelah timur; Kabupaten Tapin di sebelah selatan; dan Kecamatan Kalumpang di sebelah barat. Kecamatan Sungai Raya memiliki luas wilayah 80,96 km². Kecamatan Sungai Raya memiliki 18 Desa. Tabel berikut ini adalah PDRB Kecamatan Sungai Raya Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel 4.30
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Sungai Raya Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	132,49	134,08	136,66	142,31	154,46
Pertambangan dan Penggalian	659,00	629,49	896,46	1716,02	1814,67
Industri Pengolahan	68,66	67,25	74,22	104,13	110,84
Pengadaan Listrik dan Gas	0,64	0,69	0,74	0,63	0,69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,82	1,16	1,48	1,76	1,91
Konstruksi	77,25	81,52	48,33	63,77	100,25
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	46,86	46,57	50,21	59,12	66,24
Transportasi dan Pergudangan	85,68	96,56	107,24	123,48	149,58
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	48,62	54,34	53,13	46,40	44,65
Informasi dan Komunikasi	27,58	32,90	38,52	41,79	42,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,74	12,44	14,90	15,80	17,48
Real Estat	55,39	59,48	62,77	61,38	64,43
Jasa Perusahaan	2,05	2,08	2,16	2,39	2,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	35,02	34,45	31,99	32,61	120,33
Jasa Pendidikan	24,51	24,07	23,13	23,87	22,97
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,42	74,74	91,18	101,60	101,91
Jasa lainnya	9,16	9,62	10,14	11,33	12,13
PDRB	1335,91	1361,44	1643,27	2548,37	2827,82

Tabel 4.31
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Sungai Raya Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	94,25	94,43	94,42	93,94	98,20
Pertambangan dan Penggalian	646,70	617,20	702,82	750,84	792,96
Industri Pengolahan	46,40	44,59	47,40	63,63	67,02
Pengadaan Listrik dan Gas	0,37	0,39	0,41	0,34	0,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,59	0,83	1,04	1,21	1,32
Konstruksi	52,86	55,38	31,87	40,06	61,90
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,34	28,58	30,32	32,42	33,62
Transportasi dan Pergudangan	59,99	66,60	73,30	80,08	87,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,92	36,94	35,55	30,35	28,77
Informasi dan Komunikasi	21,40	25,64	29,78	31,76	32,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,71	8,22	9,35	9,23	10,04
Real Estat	40,62	42,91	44,47	42,62	44,05
Jasa Perusahaan	1,30	1,28	1,31	1,39	1,49
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	22,12	21,26	19,48	19,48	69,14
Jasa Pendidikan	16,68	16,20	15,18	15,49	14,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,06	49,45	58,55	63,64	62,23
Jasa lainnya	5,91	6,09	6,31	6,78	6,91
PDRB	1114,21	1115,97	1201,58	1283,27	1412,61

Berdasarkan Tabel 4.30, 4.31 dan 4.32 Diketahui bahwa Kategori Pertambangan dan Penggalian merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Sungai Raya dengan rata-rata sebesar 56,33 persen diikuti oleh Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata 7,83 persen dan kategori Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 4,52 persen. Kecamatan sungai Raya memiliki Tambang Batu bara yang telah lama dikelola oleh beberapa perusahaan seperti PT Bina Sarana Sukses, PT Antang Gunung Meratus dan KUD Karya Murni yang membuat jumlah tenaga kerja dibidang pertambangan sangat besar. Seiring dengan meningkatnya jumlah produksi batu bara dan harga jual batu bara membuat PDRB Kecamatan Sungai Raya mengalami peningkatan yang cukup besar. Kecamatan Sungai Raya juga mendapatkan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terutama sebagai Penghasil Ayam, Sapi, Kambing dan itik yang cukup besar. Disamping itu Kecamatan sungai Raya juga menghasilkan beberapa produk perkebunan seperti Kelapa, Karet dan Sawit. Kecamatan Sungai Raya juga terkenal dengan industri pengolahan Gula Merah didesa Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, Desa Bumi Berkat dan Kumpang Parang yang terletak di desa Sungai Raya Utara.

**Tabel 4.32
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Sungai Raya Tahun 2019 - 2023**

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,92%	9,85%	8,32%	5,58%	5,46%	7,83%
Pertambangan dan Penggalian	49,33%	46,24%	54,55%	67,34%	64,17%	56,33%
Industri Pengolahan	5,14%	4,94%	4,52%	4,09%	3,92%	4,52%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	0,02%	0,04%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06%	0,09%	0,09%	0,07%	0,07%	0,07%
Konstruksi	5,78%	5,99%	2,94%	2,50%	3,55%	4,15%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,51%	3,42%	3,06%	2,32%	2,34%	2,93%
Transportasi dan Pergudangan	6,41%	7,09%	6,53%	4,85%	5,29%	6,03%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,64%	3,99%	3,23%	1,82%	1,58%	2,85%
Informasi dan Komunikasi	2,06%	2,42%	2,34%	1,64%	1,51%	1,99%
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,88%	0,91%	0,91%	0,62%	0,62%	0,79%
Real Estat	4,15%	4,37%	3,82%	2,41%	2,28%	3,40%
Jasa Perusahaan	0,15%	0,15%	0,13%	0,09%	0,10%	0,13%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,62%	2,53%	1,95%	1,28%	4,26%	2,53%
Jasa Pendidikan	1,83%	1,77%	1,41%	0,94%	0,81%	1,35%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,77%	5,49%	5,55%	3,99%	3,60%	4,48%
Jasa lainnya	0,69%	0,71%	0,62%	0,44%	0,43%	0,58%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kecamatan Simpur

Secara geografis Kecamatan Simpur berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan disebelah utara; Kecamatan Kandangan disebelah timur; Kecamatan Sungai Raya disebelah selatan; dan Kecamatan Kalumpang disebelah barat. Kecamatan Simpur memiliki luas wilayah 82,34 km². Kecamatan Simpur memiliki 11 Desa. Tabel berikut ini adalah PDRB Kecamatan Simpur Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel 4.33
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Simpur Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	143,39	145,10	147,90	154,01	167,16
Pertambangan dan Penggalian					
Industri Pengolahan	36,67	39,52	43,48	43,51	46,40
Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,36	0,43	0,47	0,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,83	0,96	1,11	1,18	1,31
Konstruksi	22,32	32,39	9,40	39,64	26,85
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,99	23,82	25,71	30,15	33,90
Transportasi dan Pergudangan	8,57	8,47	7,15	5,97	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,68	1,73	2,13	0,00	4,56
Informasi dan Komunikasi	21,45	23,03	24,51	26,59	27,11
Jasa Keuangan dan Asuransi	12,39	13,13	14,90	15,80	18,57
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	36,42	38,90	34,21	35,28	37,88
Jasa Pendidikan	38,73	38,72	40,81	38,82	44,13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,55	7,72	7,24	9,09	9,13
Jasa lainnya	7,60	8,12	8,54	9,52	10,32
PDRB	362,95	381,97	367,52	410,03	434,85

Tabel 4.34
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Simpur Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	102,00	102,20	102,19	101,66	106,28
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00			
Industri Pengolahan	24,78	26,21	27,77	26,64	28,06
Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,20	0,24	0,25	0,27
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,60	0,68	0,78	0,81	0,90
Konstruksi	15,27	22,00	6,20	24,90	16,58
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,68	14,98	15,82	17,27	17,88
Transportasi dan Pergudangan	6,00	5,84	4,89	3,87	4,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,17	1,42	0,00	2,94
Informasi dan Komunikasi	16,65	17,95	18,95	20,21	20,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,14	8,67	9,35	9,23	10,66
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23,00	24,00	20,83	21,07	21,77
Jasa Pendidikan	26,37	26,05	26,79	25,20	28,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,77	5,11	4,65	5,69	5,57
Jasa lainnya	4,91	5,13	5,32	5,70	5,88
PDRB	250,54	260,21	245,20	262,51	269,68

Tabel 4.35
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Simpur Tahun 2019 - 2023

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39,51%	37,99%	40,24%	37,56%	38,44%	38,75%
Pertambangan dan Penggalian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Industri Pengolahan	10,10%	10,35%	11,83%	10,61%	10,67%	10,71%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,10%	0,09%	0,12%	0,11%	0,12%	0,11%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23%	0,25%	0,30%	0,29%	0,30%	0,27%
Konstruksi	6,15%	8,48%	2,56%	9,67%	6,17%	6,61%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,61%	6,24%	7,00%	7,35%	7,80%	7,00%
Transportasi dan Pergudangan	2,36%	2,22%	1,95%	1,46%	1,61%	1,92%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,46%	0,45%	0,58%	0,00%	1,05%	0,51%
Informasi dan Komunikasi	5,91%	6,03%	6,67%	6,49%	6,23%	6,27%
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,41%	3,44%	4,05%	3,85%	4,27%	3,81%
Real Estat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jasa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,03%	10,18%	9,31%	8,60%	8,71%	9,37%
Jasa Pendidikan	10,67%	10,14%	11,10%	9,47%	10,15%	10,31%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35%	2,02%	1,97%	2,22%	2,10%	2,13%
Jasa lainnya	2,09%	2,12%	2,32%	2,32%	2,37%	2,25%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan Tabel 4.33, 4.34 dan 4.35 Diketahui bahwa Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Simpur dengan rata-rata sebesar 38,75 persen diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan dengan rata-rata 10,71 persen dan kategori Pendidikan dengan kontribusi sebesar 10,31 persen. Kecamatan Simpur mendapatkan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terutama sebagai Penghasil Ayam, Sapi, Kambing dan itik yang cukup besar bahkan jumlah sapihnya merupakan yang terbesar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Disamping itu Kecamatan Simpur juga menghasilkan produk perkebunan berupa Kelapa. Kecamatan Simpur memberikan kontribusi sebesar 7,66 persen hasil perikanan dari total perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan Simpur juga terkenal dengan industri pengolahan terutama untuk industri kue kering, industri dodol kandangan

Kecamatan Kalumpang

Secara geografis Kecamatan Kalumpang berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan di sebelah utara; Kecamatan Simpur di sebelah timur; Kabupaten Tapin di sebelah selatan; dan di sebelah barat. Kecamatan Kalumpang memiliki luas wilayah 135, 07 km². Kecamatan Kalumpang memiliki 9 Desa. Tabel berikut ini adalah PDRB Kecamatan Kalumpang Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Berdasarkan Tabel 4.36, 4.37 dan 4.38 Diketahui bahwa Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Kalumpang dengan rata-rata sebesar 25,67 persen diikuti oleh Kategori Perdagangan besar dan Eceran sebesar 17,68 dan Industri Pengolahan dengan rata-rata 12,84 persen. Kecamatan Kalumpang mendapatkan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terutama sebagai Penghasil Ayam, Sapi, Kambing dan itik. Kecamatan Kalumpang memberikan kontribusi sebesar 14,14 persen hasil perikanan dari total perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mendukung kategori industri pengolahan terutama pengolahan ikan kering. Kecamatan Kalumpang juga terkenal dengan industri pengolahan terutama untuk industri ikan kering yang terletak di desa Desa Bago Tanggul dan anyaman purun yang berada pada Desa Balimau, dan Desa Karang Bulan.

Tabel 4.36
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Kalumpang Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	44,41	44,94	45,81	47,70	51,77
Pertambangan dan Penggalian					
Industri Pengolahan	27,26	26,80	29,31	19,87	21,23
Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,15	0,27	0,18	0,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,13	0,14	0,16
Konstruksi	26,40	12,90	20,99	12,71	14,31
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,12	27,93	30,16	35,34	39,73
Transportasi dan Pergudangan	8,57	8,47	7,15	7,97	9,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
Informasi dan Komunikasi	9,19	9,87	10,51	11,40	11,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,26	3,46	2,79	3,95	4,37
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,25	14,78	18,96	16,30	16,86
Jasa Pendidikan	13,24	12,64	13,16	13,53	13,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,70	4,48	4,09	4,02	4,28
Jasa lainnya	3,29	3,48	3,66	4,07	4,39
PDRB	187,98	170,03	186,98	177,18	192,58

Tabel 4.37
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Kalumpang Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,59	31,65	31,65	31,49	32,92
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00			
Industri Pengolahan	18,42	17,77	18,72	12,18	12,84
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,15	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,09	0,10	0,11
Konstruksi	18,06	8,77	13,84	7,99	8,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,41	24,19	25,11	26,98	28,41
Transportasi dan Pergudangan	6,00	5,84	4,89	5,17	5,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Informasi dan Komunikasi	7,13	7,69	8,12	8,66	8,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,28	1,75	2,31	2,51
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,16	9,12	11,54	9,74	9,69
Jasa Pendidikan	9,01	8,50	8,64	8,78	8,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,17	2,96	2,63	2,52	2,62
Jasa lainnya	2,12	2,20	2,28	2,44	2,50
PDRB	134,42	121,16	129,42	118,43	123,96

Tabel 4.38
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Kalumpang Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,63%	26,43%	24,50%	26,92%	26,88%	25,67%
Pertambangan dan Penggalian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Industri Pengolahan	14,50%	15,76%	15,67%	11,22%	11,02%	13,64%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08%	0,09%	0,15%	0,10%	0,10%	0,10%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08%	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,08%
Konstruksi	14,04%	7,59%	11,23%	7,17%	7,43%	9,49%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,96%	16,43%	16,13%	19,94%	20,63%	17,62%
Transportasi dan Pergudangan	4,56%	4,98%	3,82%	4,50%	4,85%	4,54%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,09%
Informasi dan Komunikasi	4,89%	5,80%	5,62%	6,43%	6,03%	5,76%
Keuangan dan Asuransi	1,74%	2,03%	1,49%	2,23%	2,27%	1,95%
Nelayan Perikanan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Real Estat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sewa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,24%	8,69%	10,14%	9,20%	8,75%	9,41%
Sewa Pendidikan	7,04%	7,43%	7,04%	7,64%	6,96%	7,22%
Sewa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50%	2,63%	2,19%	2,27%	2,23%	2,36%
Sewa lainnya	1,75%	2,05%	1,95%	2,30%	2,28%	2,07%
DRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kecamatan Daha Selatan

Kecamatan Daha Selatan merupakan Salah Satu bagian dari wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan, kecamatan ini pada umumnya adalah dataran rendah sampai berawa juga merupakan daerah pertemuan dua buah anak Sungai Barito yaitu Amandit yang hulunya diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Sungai Alai yang hulu di wilayah kabupaten lain yaitu kabupaten Hulu Sungai Tengah. Secara geografis Kecamatan Daha Selatan berbatasan dengan Kecamatan Daha Utara disebelah utara; Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah timur; Kecamatan Kandangan dan Kalumpang disebelah selatan; Kecamatan Daha Barat dan Kabupaten Tapin disebelah barat . Kecamatan Daha Selatan memiliki luas wilayah 322,82 km². Kecamatan Daha Selatan memiliki 16 Desa. Tabel berikut ini adalah PDRB Kecamatan Daha Selatan Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel 4.39
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	205,78	208,24	212,25	221,02	239,89
Pertambangan dan Penggalian					
Industri Pengolahan	51,67	50,36	54,97	56,96	60,78
Pengadaan Listrik dan Gas	0,76	0,80	0,85	0,93	1,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,43	2,68	2,73	2,79	3,05
Konstruksi	50,03	58,06	67,38	34,15	39,34
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	119,39	118,63	127,92	150,09	168,74
Transportasi dan Pergudangan	17,14	16,94	14,30	19,92	23,37
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,51	0,86	1,06	0,00	10,02
Informasi dan Komunikasi	33,71	36,19	38,52	41,79	42,60
Jasa Keuangan dan Asuransi	15,00	8,99	10,24	10,86	12,01
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	47,72	51,10	44,87	47,13	52,57
Jasa Pendidikan	73,77	80,20	81,19	82,28	82,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,71	18,68	21,58	26,07	32,79
Jasa lainnya	22,35	21,76	22,76	25,24	28,20
PDRB	665,97	673,48	700,62	719,24	796,94

Tabel 4.40
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146,38	146,66	146,65	145,90	152,52
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00			
Industri Pengolahan	34,92	33,40	35,11	34,89	36,75
Pengadaan Listrik dan Gas	0,44	0,45	0,47	0,51	0,56
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	1,90	1,92	1,93	2,10
Konstruksi	34,23	39,44	44,43	21,46	24,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	81,08	79,43	83,52	89,65	92,92
Transportasi dan Pergudangan	12,00	11,68	9,77	12,92	13,71
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,75	0,59	0,71	0,00	6,46
Informasi dan Komunikasi	26,16	28,20	29,78	31,76	32,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,86	5,93	6,43	6,35	6,90
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30,14	31,53	27,32	28,15	30,21
Jasa Pendidikan	50,22	53,97	53,30	53,41	53,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,02	12,36	13,85	16,33	20,02
Jasa lainnya	14,42	13,76	14,17	15,10	16,06
PDRB	459,34	459,31	467,45	458,34	487,62

Tabel 4.41
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,90%	30,92%	30,29%	30,73%	30,10%	30,59%
Pertambangan dan Penggalian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Industri Pengolahan	7,76%	7,48%	7,85%	7,92%	7,63%	7,73%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11%	0,12%	0,12%	0,13%	0,13%	0,12%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,36%	0,40%	0,39%	0,39%	0,38%	0,38%
Konstruksi	7,51%	8,62%	9,62%	4,75%	4,94%	7,09%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,93%	17,61%	18,26%	20,87%	21,17%	19,17%
Transportasi dan Pergudangan	2,57%	2,52%	2,04%	2,77%	2,93%	2,57%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,38%	0,13%	0,15%	0,00%	1,26%	0,38%
Informasi dan Komunikasi	5,06%	5,37%	5,50%	5,81%	5,35%	5,42%
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,25%	1,33%	1,46%	1,51%	1,51%	1,61%
Real Estat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jasa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,17%	7,59%	6,40%	6,55%	6,60%	6,86%
Jasa Pendidikan	11,08%	11,91%	11,59%	11,44%	10,35%	11,27%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,56%	2,77%	3,08%	3,62%	4,11%	3,43%
Jasa lainnya	3,36%	3,23%	3,25%	3,51%	3,54%	3,38%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan Tabel 4.39, 4.40 dan 4.41 Diketahui bahwa Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Daha Selatan dengan rata-rata sebesar 30,56 persen diikuti oleh Kategori Perdagangan besar dan Eceran sebesar 19,17 dan Kategori Pendidikan dengan rata-rata 11,27 persen. Kecamatan Daha Selatan mendapatkan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kecamatan Daha Selatan memberikan kontribusi sebesar 18,16 persen hasil perikanan dari total perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan hasil survey pertanian tahun 2023 Kecamatan Daha Selatan memiliki Rumah Tangga Petani sebesar 12,78 persen dari total rumah Tangga Petani di Kabupaten HSS. Selain Pertanian, PDRB Kabupaten Daha Selatan juga disumbangkan oleh Kategori Perdagangan besar dan Eceran. Kecamatan Daha Selatan hanya memiliki 1 pasar dengan 700 lapak dan 775 toko.

Kecamatan Daha Barat

Secara geografis Kecamatan Daha Barat berbatasan dengan Kecamatan Daha Selatan di sebelah utara dan timur; Kabupaten Tapin di sebelah barat dan selatan. Kecamatan Daha Barat memiliki luas wilayah 149,62 km². Kecamatan Daha Barat memiliki 7 Desa. Tabel berikut ini adalah PDRB Kecamatan Daha Selatan Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel 4.42
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Daha Barat Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	85,74	86,77	88,44	92,09	99,96
Pertambangan dan Penggalian					
Industri Pengolahan	19,73	19,13	20,88	23,43	25,00
Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,17	0,61	0,67	0,21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,03	0,03	0,04
Konstruksi	10,24	7,38	24,21	11,54	12,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,76	1,77	1,91	2,24	2,53
Transportasi dan Pergudangan	17,14	15,25	14,30	17,92	21,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informasi dan Komunikasi	6,13	6,58	7,00	7,60	7,75
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,61	2,76	2,79	3,95	2,18
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,16	10,33	10,66	11,56	10,51
Jasa Pendidikan	19,21	18,19	18,15	18,18	18,21
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,27	3,40	4,25	5,51	5,03
Jasa lainnya	4,18	4,25	4,47	4,99	5,37
PDRB	182,36	176,01	197,71	199,73	209,92

Tabel 4.43
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Daha Barat Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	60,99	61,11	61,11	60,79	63,55
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00			
Industri Pengolahan	13,33	12,68	13,33	14,35	15,12
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,34	0,37	0,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
Konstruksi	7,01	5,01	15,97	7,25	7,47
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,59	0,59	0,63	0,66	0,79
Transportasi dan Pergudangan	12,00	10,52	9,77	11,62	12,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informasi dan Komunikasi	4,76	5,13	5,42	5,77	5,83
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	1,83	1,75	2,31	1,25
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,05	6,38	6,49	6,91	6,04
Jasa Pendidikan	13,07	12,24	11,91	11,80	11,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,89	2,25	2,73	3,45	3,07
Jasa lainnya	2,70	2,69	2,79	2,99	3,06
PDRB	126,22	120,54	132,25	128,29	130,36

Tabel 4.44
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Daha Barat Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,02%	49,29%	44,73%	46,11%	47,62%	46,95%
Pertambangan dan Penggalian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Industri Pengolahan	10,82%	10,87%	10,56%	11,73%	11,91%	11,18%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08%	0,09%	0,31%	0,34%	0,10%	0,18%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%
Konstruksi	5,62%	4,19%	12,25%	5,78%	5,76%	6,72%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,96%	1,01%	0,96%	1,12%	1,20%	1,05%
Transportasi dan Pergudangan	9,40%	8,66%	7,23%	8,97%	10,02%	8,86%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Informasi dan Komunikasi	3,36%	3,74%	3,54%	3,80%	3,69%	3,63%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,43%	1,57%	1,41%	1,98%	1,04%	1,49%
Real Estat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jasa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,12%	5,87%	5,39%	5,79%	5,01%	5,64%
Jasa Pendidikan	10,53%	10,34%	9,18%	9,10%	8,67%	9,56%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,34%	1,93%	2,15%	2,76%	2,40%	2,32%
Jasa lainnya	2,29%	2,42%	2,26%	2,50%	2,56%	2,41%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan Tabel 4.42, 4.43 dan 4.44 Diketahui bahwa Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Daha Barat dengan rata-rata sebesar 46,95 persen diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan sebesar 11,18 dan Kategori Jasa Pendidikan dengan rata-rata 9,56 persen. Kecamatan Daha Barat mendapatkan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kecamatan Daha Selatan memberikan kontribusi sebesar 11,79 persen hasil perikanan dari total perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan Daha Barat juga terkenal dengan peternakan kerbau, ayam dan itik. Kecamatan Daha Barat juga sedang membuka perkebunan kelapa sawit, serta memiliki hutan produksi. Berdasarkan hasil survey pertanian tahun 2023 Kecamatan Daha Selatan memiliki Rumah Tangga Petani sebesar 5,32 persen dari total rumah Tangga Petani di Kabupaten HSS. Selain Pertanian, PDRB Kabupaten Daha Barat juga disumbangkan oleh Kategori industri Pengolahan. Kecamatan Daha Barat terutama industri pengolahan ikan kering.

Kecamatan Daha Utara

Secara geografis Kecamatan Daha Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara disebelah utara; Kabupaten Hulu Sungai Tengah disebelah timur; Kecamatan Daha Selatan disebelah selatan dan barat . Kecamatan Daha Utara memiliki luas wilayah 268,11 km². Kecamatan Daha Utara terdiri dari 19 desa. Tabel berikut ini adalah PDRB Kecamatan Daha Selatan Atas dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

Tabel 4.45
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Daha Utara Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155,57	157,43	160,46	167,10	181,36
Pertambangan dan Penggalian					
Industri Pengolahan	40,86	39,70	43,38	54,71	58,33
Pengadaan Listrik dan Gas	0,54	0,58	0,18	0,19	0,74
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,44	2,86	2,90	2,89	3,02
Konstruksi	50,51	50,64	59,96	49,91	31,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	58,55	58,16	62,69	72,26	82,72
Transportasi dan Pergudangan	8,57	8,47	7,15	7,97	9,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,51	2,59	2,13	0,00	1,82
Informasi dan Komunikasi	15,32	16,45	17,51	18,99	19,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,87	6,22	7,45	6,91	8,74
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	30,70	29,14	28,88	29,35	30,71
Jasa Pendidikan	75,34	75,27	75,34	76,39	75,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,25	9,42	8,50	9,39	9,13
Jasa lainnya	17,35	17,03	17,84	19,82	22,16
PDRB	474,39	473,94	494,37	515,88	535,17

Tabel 4.46
Produk Domestik Regional Bruto Lapangan Usaha
Kecamatan Daha Utara Tahun 2019 - 2023
Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	110,67	110,88	110,87	110,30	115,31
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00			
Industri Pengolahan	27,61	26,33	27,71	33,51	35,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,32	0,10	0,10	0,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,74	2,03	2,04	2,00	2,07
Konstruksi	34,56	34,40	39,54	31,36	19,73
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	43,91	43,12	45,47	48,54	50,28
Transportasi dan Pergudangan	6,00	5,84	4,89	5,17	5,48
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,75	1,76	1,42	0,00	1,17
Informasi dan Komunikasi	11,89	12,82	13,54	14,44	14,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,86	4,11	4,67	4,04	5,02
Real Estat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,39	17,98	17,59	17,53	17,64
Jasa Pendidikan	51,28	50,65	49,46	49,58	48,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,93	6,23	5,46	5,88	5,57
Jasa lainnya	11,20	10,77	11,11	11,86	12,62
PDRB	331,10	327,24	333,86	334,31	333,86

Tabel 4.47
Kontribusi Masing Masing Kategori PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kecamatan Daha Utara Tahun 2019 – 2023

Lapangan Usaha	PDRB atas Dasar harga Berlaku					
	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,79%	33,22%	32,46%	32,39%	33,89%	32,95%
Pertambangan dan Penggalian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Industri Pengolahan	8,61%	8,38%	8,78%	10,60%	10,90%	9,45%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,11%	0,12%	0,04%	0,04%	0,14%	0,09%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,51%	0,60%	0,59%	0,56%	0,56%	0,57%
Konstruksi	10,65%	10,68%	12,13%	9,68%	5,97%	9,82%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,34%	12,27%	12,68%	14,01%	15,46%	13,35%
Transportasi dan Pergudangan	1,81%	1,79%	1,45%	1,54%	1,75%	1,67%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,53%	0,55%	0,43%	0,00%	0,34%	0,37%
Informasi dan Komunikasi	3,23%	3,47%	3,54%	3,68%	3,62%	3,51%
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24%	1,31%	1,51%	1,34%	1,63%	1,41%
Real Estat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Jasa Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,47%	6,15%	5,84%	5,69%	5,74%	5,98%
Jasa Pendidikan	15,88%	15,88%	15,24%	14,81%	14,16%	15,19%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,16%	1,99%	1,72%	1,82%	1,71%	1,88%
Jasa lainnya	3,66%	3,59%	3,61%	3,84%	4,14%	3,77%
PDRB	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan Tabel 4.45, 4.46 dan 4.47 Diketahui bahwa Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Kecamatan Daha Utara dengan rata-rata sebesar 32,95 persen diikuti oleh Kategori Jasa Pendidikan sebesar 15,19 persen dan Kategori Perdagangan besar dan Eceran dengan rata-rata 13,35 persen. Kecamatan Daha Utara mendapatkan kontribusi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kecamatan Daha Selatan memberikan kontribusi sebesar 20,33 persen hasil perikanan dari total perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan Daha Utara juga terkenal dengan peternakan kerbau rawa, sapi, ayam dan itik. Berdasarkan hasil survey pertanian tahun 2023 Kecamatan Daha Selatan memiliki Rumah Tangga Petani sebesar 9,66 persen dari total rumah Tangga Petani di Kabupaten HSS.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad Lincolin, (1999), Ekonomi Pembangunan: Edisi keempat, (Yogyakarta: STIE YKPN).
- Boediono, (1999) Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi, BPFE, Yogyakarta
- Fajar, Muhammad (2016), Estimasi PDRB Nominal Level Kecamatan di Kabupaten Waropen, Research Gate
- Kuncoro, Mudrajad, (2003). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga
- Michael Todaro,(2000) Pembangunan Ekonomi Di dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar :edisi ketiga,
- Rahardjo Adisasmita, (2013) Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahardjo Adisasmita,(2014) Pertumbuhan Wilayah dan Wilayah Pertumbuhan, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sadono Sukirno. (2012) .Makro Ekonomi. Jakarta : PT. Raja Gapindo Persada
- Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Baduouse Media, Cetakan Pertama, Padang
- BPS Hulu Sungai Selatan (2024),Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Hulu Sungai Selatan Menurut Lapangan Usaha